



Kota Kendari



Audiensi Kepala BNN Kota Kendari dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara membahas Sinergi dan Kolaborasi



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KENDARI



Kendari Menerima Penghargaan Zero Retur Tahun Anggaran 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA. 2024 BNN KOTA KENDARI



Email: bnnkota_kendari@bnn.go.id

Website: kendarikota.bnn.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Hal tersebut memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Kendari di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance* dan *clean government*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Kota Kendari atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka program P4GN. Asas akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dengan demikian setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu memberikan dan mempertanggungjawabkan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat atas setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan

meningkatkan efisiensi efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Tahun 2024 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Badan Narkotika Nasional Kota Kendari dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Tahun 2024, yang dilakukan dalam upaya memenuhi Visi “Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Selama tahun 2024, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahunan telah berhasil dicapai.

Akhirnya diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari secara keseluruhan.

Semoga LKIP ini bermanfaat khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance and Clean Government* di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua, Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BNN KOTA KENDARI	7
A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	12
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Analisis Capaian Sasaran	17
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	51
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Untuk mengukur realisasi kinerja, maka mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi telah ditetapkan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka panjang. Upaya realisasi visi dan misi dijabarkan dalam bentuk penetapan tujuan program yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan sebagaimana dituangkan dalam rencana strategi organisasi periode lima tahunan (2020-2024), dan dalam program tahunan sebagaimana diuraikan dalam bentuk operasional kegiatan pada rencana kerja tahunan.

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator utama secara ringkas dapat Kami laporkan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Sebesar **Rp.1.839.529.442** dari Total Anggaran Rp.1.887.664.000 atau sebesar **98,43%**
2. Indeks Ketahanan Diri Remaja Target 52 realisasi 54,96
3. Indeks Ketahanan Diri Keluarga Target 86,875 realisasi 75,982
4. Indeks Kemandirian Partisipasi Target 3,48 realisasi 3,72
5. Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup target sebesar 68% realisasi 67,86%
6. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 10 Orang realisasi 10 Orang
7. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional Target 1 Lembaga realisasi 1 Lembaga
8. Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang operasional target 2 Unit realisasi 2 Unit
9. Indeks Kepuasan penerima Layanan Rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN Target 3,42 realisasi 3,59
10. Nilai Kinerja Anggaran Target 90 Realisasi 99,04
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Target 96,92 Realisasi 98,42

Masalah/kendala yang secara langsung ditemui, terkait dengan teknis pelaksanaan program adalah keterbatasan sarana/prasarana serta sumberdaya tenaga yang dimiliki khususnya terkait dengan kegiatan bidang pemberantasan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan/kendala diatas adalah melakukan koordinasi dengan Polresta Kendari dan BNN Prov. Sultra. Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang adalah melalui pengembangan kemitraan dengan stakeholder terkait dan perumusan kebijakan operasional program dengan kearifan lokal dalam rangka partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah Kota Kendari melalui pembentukan Peraturan Walikota Kendari Nomor 4 Tahun 2017 tentang P4GN dan penyusunan Rancangan Perda Kota Kendari Tentang P4GN.

Kendari, 17 Januari 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Kendari**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "BADAN NARKOTIKA NASIONAL" at the top and "KOTA KENDARI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "KEPALA" is written in a larger font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohamad Dafi Bastomi, SH.,S.I.K.,M.I.K

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi penyelenggara pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas mengatur tentang kewajiban setiap penyelenggara negara menyusun laporan kinerja masing-masing sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada instansi sebagai organisasi penyelenggara fungsi pemerintahan.

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen.

Dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan prioritas pertama dari sebelas prioritas pembangunan nasional adalah reformasi birokrasi dan tata pemerintah. Prioritas reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparat pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk perbaikan pelayanan dari aparat pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis organisasi. Upaya konkrit pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan instansi pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Badan Narkotika Nasional Kota Kendari merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BNN yang berkedudukan di Kota Kendari, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka BNN Kendari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara transparan dan akuntabel dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNN No 5 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
- 10) DIPA BNN Kota Kendari Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-066.01.2.689753/2024 tanggal 27 November 2023.

C. Tugas Pokok dan Fungsi organisasi Serta Struktur Organisasi

Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, yang selanjutnya dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ disebut BNNK/Kota adalah instansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

1. Kedudukan

BNN Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.

2. Tugas

BNN Kota Kendari mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Kendari

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BNN Kota Kendari menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Kendari;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Kendari;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Kendari;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Kendari;
- e. pelayanan administrasi Kota Kendari; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kota Kendari.

Struktur Organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Bab II Bagian Kedua, Pasal 16 terdiri atas:

1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Kendari terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Kendari sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - ✚ Memimpin BNNK / Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten / Kota ; dan
 - ✚ Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan Kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten / Kota.

- b. Sub bagian Umum mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNN Kota Kendari.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BNN KOTA KENDARI

A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja

Perencanaan strategis adalah suatu proses sistematis dari suatu organisasi dalam realisasi tujuan utama yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Badan Narkotika Nasional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi telah menyusun rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan periode tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis ditetapkan Visi yang akan dicapai melalui pelaksanaan misi yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan strategis dan kebijakan program dan kegiatan yang memberikan daya ungkit untuk realisasi visi dan misi.

1. Visi dan Misi

BNN Kota Kendari sebagai salah satu Satker di lingkungan BNN memiliki visi sebagai berikut **“Terwujudnya Masyarakat yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba dalam rangka menuju Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi BNN Kota Kendari sebagai berikut:

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika
- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

2. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Kota Kendari Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Tujuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang diinginkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal.
- b. Mewujudkan Transformasi layanan publik yang berkualitas. Kinerja kelembagaan harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh elemen masyarakat.

3. Sasaran

BNN Kota Kendari dalam melaksanakan fungsinya mengacu pada Sasaran strategis BNN dan indikator kinerja BNN sebagai tolok ukur penilaian kinerja organisasi dari masing-masing tujuan diatas adalah :

Meningkatnya pelaksanaan penanganan Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara Efektif dan Efisien di Wilayah Kota Kendari. Berikut Program, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BNN Kota Kinerja 2020-2024 pada **Tabel 1** sebagai berikut

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah anak/remaja dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kota	50	51	51	53	53,51
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah keluarga dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kota Kendari	-	78,67	78,6 6	77	78,68
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Lembaga dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kota Kendari	3,10	3,20	3,20	3,4	3,4

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kendari					
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	5	5	5	5
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kota Kendari	1	1	1	1	1
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Kendari	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
6.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman terlaran	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika yang P-21	1 per perkara	1 Perkar a	1 Perkar a	1 perkar a	1 perkar a
7.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	3 Orang	3 Org	3 Org	3 Orang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari	88	90	88	89	90
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari	-	94	95	92	95

B. Rencana Kinerja Tahunan

BNN Kota Kendari menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis BNN Kota Kendari 2020-2024 dan dengan mempedomani Rencana Kerja BNN Tahun 2024. RKT BNN Kota Kendari Tahun 2024 ini merupakan gambaran rencana program kerja satuan kerja BNN Kota Kendari dalam satu tahun.

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Kendari Tahun 2024 pada **Tabel 2** sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10 Orang	70.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	- 5 Keluarga - 2 Desa	106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	187.195.000
4.	Pasca rehabilitasi Penyalahgunaan dan /atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Persentase Penyalahguna dan / atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	15 Orang	10.165.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.800.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	5.845.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit	42.485.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,56	283.675.000

7.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan		
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	3 Orang	7.875.000
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	2 Dokumen	6.356.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	12 Layanan	105.504.000
			Nilai IKPA mencapai target	2 Dokumen	1.280.000
13	Penyelenggaraan Ketatausahaan, rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	13 Layanan	997.704.000
			Indeks kualitas pengadaan dan Pengelolaan Barang/jasa	5 Unit	26.000.000
14	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolanan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokolanan yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks layanan kehumasan - Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokolanan 	1 Layanan	10.000.000
15	Pengembangan Organisasi, tatalaksana dan Sumber Daya manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian (skala 4) - Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana 	1 Layanan	11.280.000

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

C. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja BNN, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) BNN Kota Kendari Tahun 2024 agar dapat mengukur kinerja BNN Kota Kendari. Penetapan kinerja ini sebagai alat ukur kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2024 BNN Kota Kendari memiliki 11 indikator kinerja. Target indikator kinerja disajikan pada **tabel 3**.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,875
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,48
4	Meningkatnya upaya pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1
			Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2
		Unit	

7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Kendari	3,42
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari	96,92

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja BNN Kota Kendari Tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator kinerja utama sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Realisasi sepuluh indikator kinerja BNN Kota Kendari Tahun 2024 disajikan pada **tabel 4**

Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja BNN Kota Kendari Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52	54,96	105,69
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,875	75,982	87,46
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,48	3,72	106,90
4	Meningkatnya upaya pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	67,86	99,79
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100,00
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1	100,00

		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2	100,00
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Kendari	3,42	3,59	104,97
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari	90	99,04	110,04
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) BNN Kota Kendari	96,92	98,42	101,54

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Kendari selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel dan grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BNN Kota Kendari.

Untuk mengetahui capaian kinerja BNN Kota Kendari Tahun 2024, diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama sesuai dengan bidang program P4GN dengan Uraian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dalam indicator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Tahun 2024	%
1	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba	52,00	54,96	105,69

Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Target indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba pada Tahun 2024 adalah sebesar 52 atau kategori tinggi dengan sasaran remaja Kota Kendari usia 13 s.d. 18 Tahun.

Adapun yang menjadi dasar Pengukuran Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pada pelaksanaan kegiatan pengumpulan data akan bersamaan dengan kegiatan tatap muka atau dengan teknik lain (snowball) terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pelaksana pengukuran harus memastikan bahwa Lokus Kegiatan yaitu Sekolah atau Kampus (Target Sasaran adalah Anak & Remaja dengan usia 13 s.d. 18 tahun).
2. Setelah Lokus Kegiatan diketahui, maka pelaksana kegiatan mencari informasi dari pihak yang bertanggung jawab di Lokus tersebut terkait data dukung yang akan diinput pada saat pengisian Kode Instrumen pada sistem aplikasi dektari, yaitu:
 -  Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah ada di Lokus Kegiatan pada 1 (satu) tahun terakhir.
 -  Kegiatan positif yang ada di Lokus Kegiatan seperti kegiatan ekstra kurikuler, kelompok pelajar atau mahasiswa peduli bahaya penyalahgunaan narkoba, kegiatan pengembangan keterampilan, dan sejenisnya).
 -  Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan positif tersebut.

3. Pelaksana kegiatan Login di aplikasi kuesioner Dektari atau web cegahnarkoba.bnn.go.id pada sub menu Dektari, dengan memilih menu Input Data Instrumen dan mengisi Form yang tersedia (sebagai filter untuk tiap lokus pengumpulan data).
4. Setelah Isian terisi, maka Kode Instrumen didapat melalui Email, dan diinformasikan kepada Peserta atau Responden untuk mengisi sesuai kuesioner nantinya sesuai Kode Instrumen yang telah dibuat
5. Selanjutnya, Pelaksana Kegiatan pada saat kegiatan tatap muka atau yang sejenisnya, dapat melakukan pengisian kuesioner yang dapat dilakukan sebelum kegiatan inti dilakukan atau setelah kegiatan, dengan prinsip transparansi dan keterbukaan tanpa paksaan kepada peserta (atau mempengaruhi jawaban peserta). Pengisian dapat dilakukan secara online melalui www.cegahnarkoba.bnn.go.id/dektari atau <https://bnn.go.id/dektari> atau sistem aplikasi Dektari.
6. Bila karena suatu hal para peserta atau responden tidak dapat secara langsung pada sistem, maka Pelaksana Kegiatan menyiapkan Kuesioner tercetak (cukup dibuat yang dapat digunakan berkali-kali, dengan lembar jawaban dari kertas terpisah). Selanjutnya, pelaksana kegiatan bertanggung jawab untuk menginput Kuesioner secara *Online* ke *link online* seperti di atas, dari jawaban kuesioner peserta yang telah dikumpulkan.
7. Pelaksana kegiatan kemudian dapat mengecek rekapitulasi jumlah peserta yang telah menginput melalui notifikasi yang di terima melalui email masing-masing.

Jika dibandingkan dengan hasil angka perhitungan Dektari Nasional Tahun 2024 sebagai **“benchmark”** kinerja yaitu **53,51 Indeks (Tinggi)**, dan merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kota Kendari mencapainilai **54,96 Indeks (Tinggi)** pada Tahun 2024, maka capaian yang ditargetkan tersebut dapat terealisasi diatas target yang diberikan.

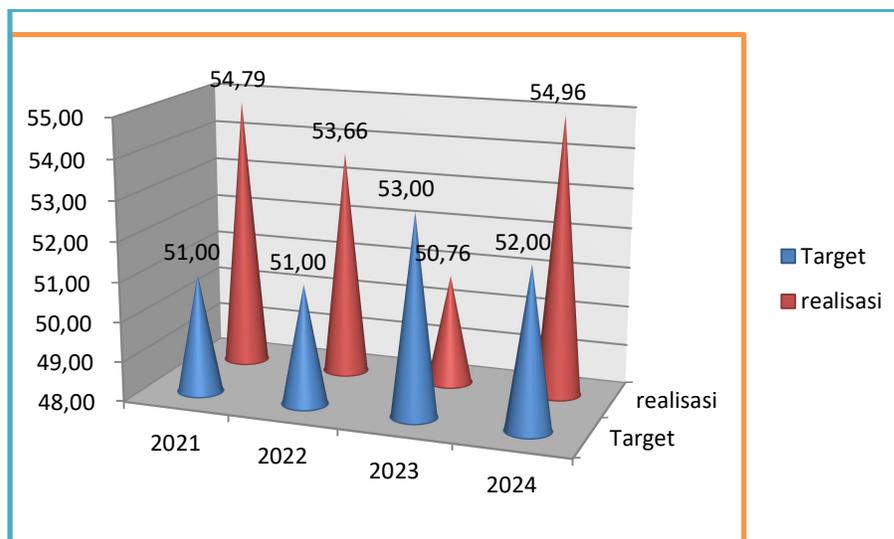
Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra	% Realisasi
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,96	53,51	102,70

Target Renstra Indikator Kinerja “ Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba” BNN kota Kendari tahun 2024 adalah 53,51. Capaian kinerja adalah 54,96 telah bahkan melebihi target Renproja yaitu sebesar 102,70%.

Analisis dan Evaluasi realisasi Kinerja dengan realisasi tahun tahun sebelumnya :

Tahun	Target	realisasi	% Realisasi
2021	51,00	54,79	107,43%
2022	51,00	53,66	105,22%
2023	53,00	50,76	95,77%
2024	52,00	54,96	105,69%



Analisi Kinerja dalam keberhasilan mencapai target Kinerja:

Adapun keberhasilan dari hasil pengukuran pengukuran indeks ketahanan diri remaja adanya sinergitas antara BNN kota Kendari dan Stakeholder terkait diantaranya pihak dinas pendidikan dan sekolah yang menjadi target sasaran kegiatan penghitungan Indeks Ketahanan Diri remaja.

Analisis Kualitas atas keberhasilan / kegagalan serta upaya nyata :

Berkoordinasi dengan para stakeholder terkait pada saat penginputan Dektari dan berkoordinasi dengan BNN RI terkait hasil angka dektari.

Analisis Sumber daya dalam mencapai kinerja :

Petugas Enumerator yang merupakan penyuluh Narkoba harus mempunyai kompetensi yang baik dalam penyampaian kuesioner sehingga diperlukan bimbingan teknis mengenai hal tersebut.

Analisis upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja :

- Memperdayakan Siswa atau guru yang telah menjadi penggiat Anti Narkoba untuk dapat turun langsung memberikan informasi tentang P4GN di sekolah masing-masing.
- Menjalin Koordinasi dan sinergitas yang baik dengan pihak sekolah.
- Memberikan informasi kepada para siswa mengenai cara pengisian kuesioner.
- Berkoordinasi dengan BNNP dan BNN RI agar pengisian Kuesioner telah terisi dengan benar berdasarkan indikatornya.

2. Sasaraan Strategis	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
------------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Tahun 2024	%
2	Indeks Ketahanan diri Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba	86,875	75,982	87,46

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Advokasi)

Definisi operasional

Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Hasil

Target Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah sebesar 86,875 dengan sasaran 10 Keluarga yang terdiri dari anak dan bapak atau anak dan ibu, dimana usia anak antara 13 s.d 15 Tahun. Lokus kegiatan adalah kelurahan yang telah dilakukan intervensi ketahanan berbasis sumberdaya pembangunan desa/kelurahan pada Tahun 2024 yaitu Kelurahan Wua-wua dan Kelurahan Lepo-lepo.

Indeks ketahanan keluarga dapat diukur jika 10 keluarga tersebut telah mengikuti kegiatan Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba sebanyak 4 sesi

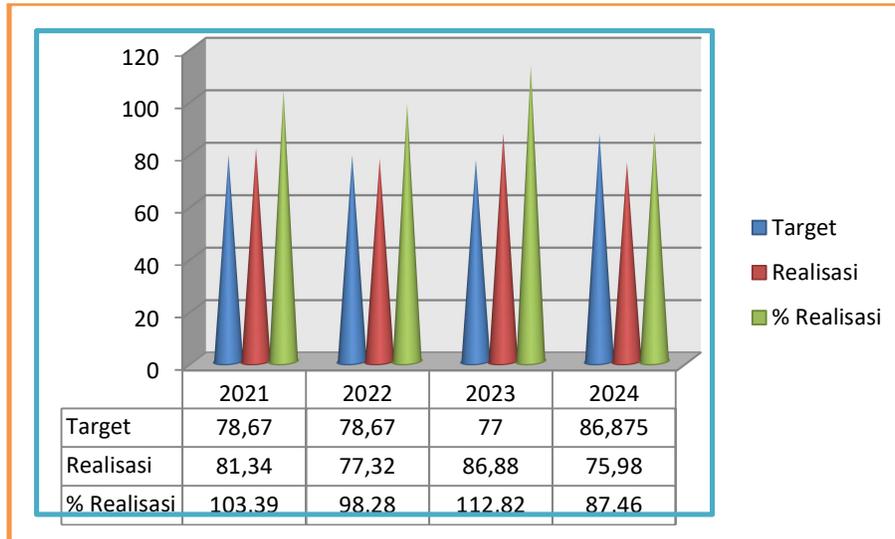
Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba telah dilaksanakan dengan melibatkan 10 Keluarga, masing-masing keluarga yang terdiri dari 1 Orang Tua dan 1 Orang Anak yang berumur 13-15 Tahun, yang berdomisili di Kelurahan Bersinar yaitu Kelurahan Wua-wua dan Kelurahan Lepo-lepo.

Analisis dan Evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Renstra 2024	% Realisasi
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	75,982	78,68	96,57

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 tidak mencapai target Restra untuk tahun 2024 yaitu hanya sebesar 96,57% dari target Restra.

Analisis dan evaluasi realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun-tahun sebelumnya.



Dari Grafik diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2024. Capaian Kinerja untuk indeks Ketahanan Keluarga Terhadap penyalahguna Narkoba hanya sebesar 87,46%.

Jika dibandingkan dengan hasil angka perhitungan Deklara Nasional Tahun 2024 sebagai **“benchmark”** kinerja yaitu **86,787 (Tinggi)**, dan Nilai Realisasi BNN Kota Kendari Tahun 2024 yaitu **75,982 (Rendah)** berarti % capaian realisasi **Sebesar 87.55%**.

Analisis Kegagalan Dalam mencapai Target Kinerja

Adapun Kegagalan hasil pengukuran indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga mendapat penilaian kategori rendah disebabkan oleh :

- ❖ Tingkat pendidikan responden mempengaruhi cara responden dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan kuesioner
- ❖ Responden mengalami kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi pertanyaan kuesioner sehingga jawaban yang diberikan cenderung sederhana

- ❖ Waktu pengisian kuesioner yang terbatas menyebabkan peserta dalam pengisian kuesioner tidak berjalan dengan baik, terburu-buru dan memberikan jawaban yang kurang cermat.
- ❖ Masalah teknis dalam mengisi kuesioner (system error dan jaringan internet yang kurang bagus saat pengisian kuesioner) sehingga peserta kesulitan menyelesaikan pengisian kuesioner dan mengurangi motivasi peserta dalam menjawab pertanyaan dengan lebih lengkap dan akurat

Analisis Efisiensi Sumber daya dalam mencapai target kinerja :

Diperlukan peningkatan Kompetensi sebagai penyuluh dan sebagai Fasilitator yang berupa Bimbingan Teknis atau Workshop.

Analisis Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya:

Mendorong Petugas untuk segera menginput kuesioner ketahanan keluarga serta berkoordinasi dengan BNN RI terkait input dan hasil kuesioner ketahanan keluarga.

3. Sasaraan Strategis	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN
------------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja pada **Tabel**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
3	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,48	3,72	106,89%

Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga Yang Berpartisipasi Aktif Dalam Mewujudkan IKOTAN (Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba)

Definisi Operasional

Peran serta institusi dan lembaga dalam penanganan masalah narkoba dapat dilihat dari seberapa besar intitusi/lembaga tersebut berperan aktif melaksanakan kegiatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri.

Indeks kemandirian partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing- masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan Pendidikan dan lingkungan masyarakat (kelurahan, komunitas, orsosmas, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Hasil

Target Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) BNN Kota Kendari pada Tahun 2024 adalah 3,48 (sangat mandiri). Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada T.A. 2024 adalah 3,72 (Sangat Mandiri).

Adapun instrument untuk mengukur indeks kemandirian partisipasi (IKP) terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variable sebagai berikut:

- a. SDM: adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figure yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya
- b. Metode: adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, konseling, dan pelaksanaan tes urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran: adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- d. Material: adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya
- e. Sistem (kebijakan): adanya system, regulasi, atauran mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktifitas: adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat P4GN.

Adapun Klasifikasi Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi adalah Sebagai berikut :

1. Tidak Mandiri : 1,00 – 1,75
2. Kurang Mandiri : 1,76 – 2,50
3. Mandiri : 2,51 – 3,25
4. Sangat Mandiri : 3,26 – 4,00

Secara umum, kegiatan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dalam upaya mewujudkan partisipasi aktif instansi/lingkungan dilaksanakan pada 2 (dua) lokus kegiatan, yakni:

1. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat diawali dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba pada Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Bersinar yaitu Kelurahan Wua-wua dan Kelurahan Lepo-lepo yang diikuti oleh 25 orang yang merupakan Wakil RT dan Anggota IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat).

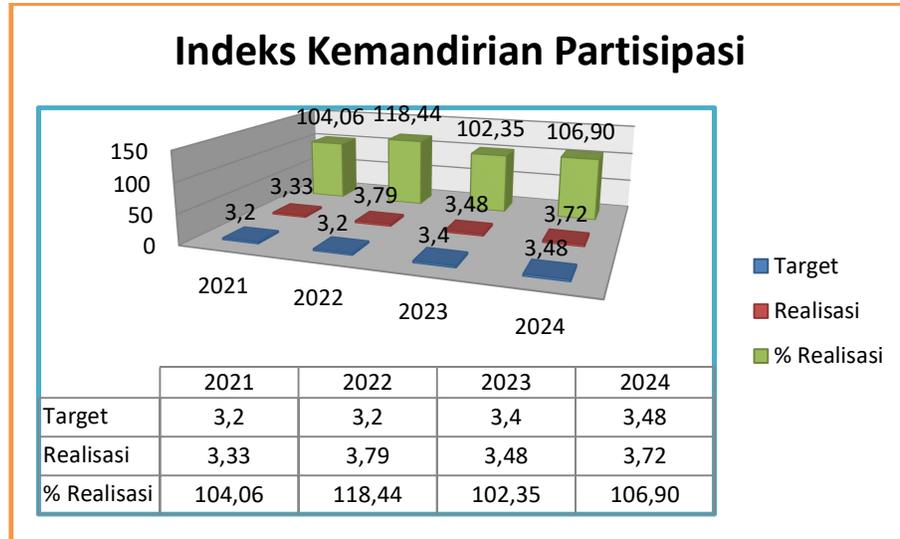
2. Pemberdayaan Masyarakat Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan

Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan diawali dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba pada Lingkungan Pendidikan di Kelurahan Bersinar yaitu Kelurahan Lepo-lepo dan Kelurahan Wua-wua yang diikuti oleh 25 orang yang merupakan Wakil Kepala Sekolah/Guru dari 25 sekolah (SD dan SMP, SMA/Sederajat).

3. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Monitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melibatkan 20 orang penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan dan 20 orang penggiat P4GN di lingkungan Masyarakat Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kuesioner Indeks Kemandirian Partisipasi. Dari 40 responden diperoleh nilai Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kota Kendari T.A. 2024 adalah 3,72 (Sangat Mandiri).

Analisis dan evaluasi realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun-tahun sebelumnya.



Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi setiap Tahunnya mengalami Peningkatan Capaian Realisasi Kinerja yang sangat Baik.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi nasional (*Benchmark*) :

Berdasarkan hasil realisasi secara nasional Indeks Kemandirian Partisipasi yaitu sebesar **3,59** dan realisasi Kinerja Tahun 2024 untuk BNN Kota Kendari sebesar **3,72** maka jika dibandingkan akan mencapai persen realisasi sebesar **103,62 %**.

Analisis Keberhasilan dalam mencapai Target kinerja :

Secara umum kegiatan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dalam upaya mewujudkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan pada 2 lokus kegiatan yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan dapat terlaksana dengan baik karena sudah terjalinnya hubungan yang baik antara stakeholder pendidikan dan peran serta masyarakat.

Analisis Keberhasilan / kegagalan serta upaya nyata dalam mencapai Target Kinerja :

- Menjalin hubungan yang baik dengan Stakeholder terkait dan para tokoh masyarakat;
- Mengajak para Penggiat Anti Narkoba agar dapat menjalankan program P4GN;

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai Kinerja :

- Pemberdayaan para penggiat Anti Narkoba yang menjadi tokoh dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menjalankan progra P4GN
- Koordinasi dan sinergitas antara stakeholder terkait dan tokoh masyarakat.

4. Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan / atau Pecandu Narkotika
-----------------------------	---

Indikator Kinerja : Presentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup.

Proses rehabilitasi sangat erat hubungannya dengan tingkat kualitas hidup seseorang. Seperti yang kita semua tahu, seseorang yang ketergantungan narkotika akan mengalami penurunan kualitas hidup, hal ini bisa dilihat dari pengguna narkotika menghindari keramaian, tidak produktif, tidak berkonsentrasi saat belajar, dinamika emosi yang tidak stabil, dan masih banyak lagi. Salah satu instrumen untuk mengetahui tingkat kualitas hidup seseorang adalah dengan World Health Organization Quality Of Life – BREF (WHOQOL – BREF).

Pertanyaan – Pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup seseorang. meliputi Kesehatan fisik (physical health), psikologik (psychological), hubungan sosial (social relationship), dan lingkungan (environment). Dari keseluruhan total 24 pertanyaan yang terdiri dari 7 pertanyaan tentang Kesehatan fisik, 6 pertanyaan tentang psikologik, 3 pertanyaan dari domain hubungan sosial, dan 8 pert Untuk melaksanakan

proses rehabilitasi kepada klien, Badan Narkotika Nasional Kota Kendari harus mengetahui bagaimana tingkat kualitas hidup klien yang akan direhabilitasi. Hal itu bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana klien akan direhabilitasi serta dapat membantu klien untuk mengetahui sejauh mana klien membutuhkan bantuan dalam segi kesehatan fisik, atau membutuhkan bantuan dari segi hubungan sosial, atau membutuhkan bantuan dari segi psikologik, maupun membutuhkan bantuan dari segi lingkungan. harapannya diakhir rehabilitasi dengan menggunakan WHOQOL – BREF, klien mampu melakukan kegiatannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Itu bisa menjadi kemajuan dalam peningkatan kualitas hidup klien.

Adapun cara menghitung WHOQoL yaitu dengan menjumlahkan Score pada masing-masing 4 Domain.

pertanyaan dari domain lingkungan. Selain itu, WHOQOL – BREF juga dapat mengukur kualitas hidup secara umum dan Kesehatan.

Score / Nilai	Kualitas Hidup
76-100%	Kualitas Hidup Baik
56-75%	Cukup
<56%	Kualitas Hidup Kurang

Tata Cara Menghitung Output

Persentase Penyalah Guna yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup :

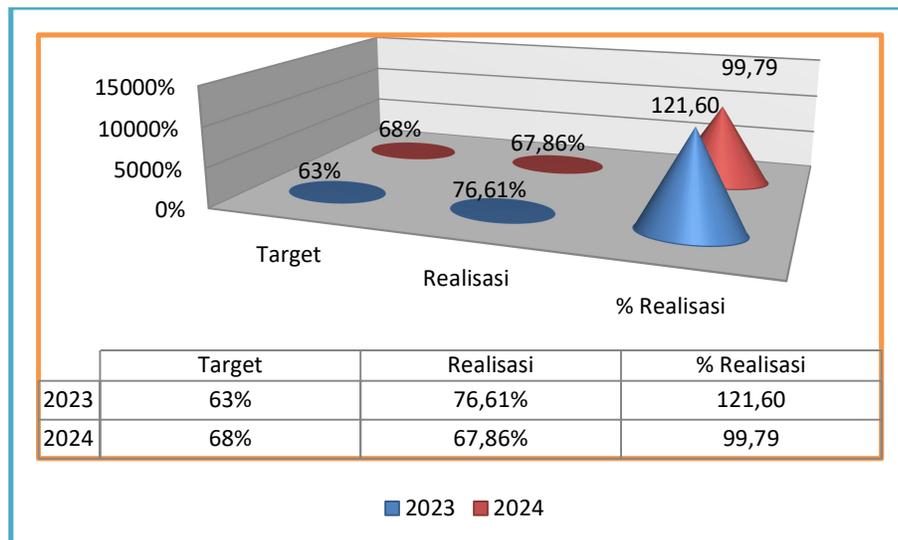
$$= \frac{\text{Jumlah Klien yang akan WHOQoL naik}}{\text{Jumlah Klien Selesai Rehab + Pasca}} \times 100\%$$

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Tahun 2024.

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
4	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	67,86%	99,79%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja sebesar 67,86% dari Target 68% atau sebesar 99,79%.

Analisis dan evaluasi kinerja dengan tahun sebelumnya



Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional (*benchmark* kinerja) yaitu sebesar 66,11% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 67,86% maka terjadi peningkatan sebesar 102,65%.

Adapun Kendala/hambatan dalam mencapai target kinerja yaitu

Pada saat penginputan data Klien pasca rehabilitasi realisasi BNN Kota Kendari 15 Klien tapi hasil evaluasi mencantumkan hanya 14 Klien ini disebabkan masalah teknis penginputan dan jaringan.

Analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya :

- Rentang waktu pengukuran WHOQoL-BREF pada klien rehabilitasi rawat jalan di Klinik antara awal dan akhir layanan yaitu sekitar 8 minggu hingga 12 minggu;
- Kemampuan klien dalam memahami pertanyaan pada instrumen WHOQoLBREF;
- Kondisi suasana hati klien dalam mengisi instrumen WHOQoL-BREF, dengan mempertimbangkan tidak hanya satu instrumen layanan rehabilitasi yang harus diisi oleh klien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:

- Pengisian instrumen WHOQoL-BREF dilakukan secara mandiri oleh klien dengan kemampuan yang cukup, jika tidak maka petugas
- pendampingan atau wawancara terhadap klien saat pengisian instrumen WHOQoL-BREF;
- Petugas membina komunikasi yang baik dengan klien dan atau keluarga klien;
- Petugas memastikan klien memahami instruksi pengisian dan tujuan dari pengisian setiap instrumen yang ada pada layanan rehabilitasi.

Analisis upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja ke depannya :

- Pastikan sebelum melakukan proses wawancara diberikan beberapa aturan dasar seperti lamanya proses wawancara, dipersilahkan untuk minum dan buang air kecil terlebih dahulu;
- menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif terhadap lingkungan sekitar dalam proses wawancara;
- Mencari informasi terkait klien melalui keluarga atau orang terdekat

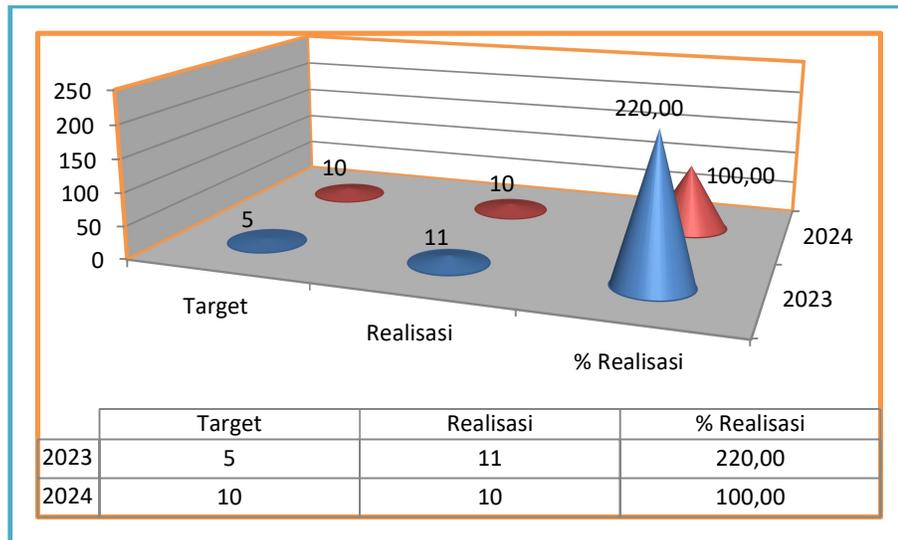
5. Sasaraan Strategis	Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
------------------------------	--

Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang Terlatih

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
5	Jumlah petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

IBM merupakan penanganan terdepan dan terdekat bagi penyalahguna narkoba yang berada di tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh agen pemulihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Lurah. Untuk menjalankan IBM yang telah terbentuk agen pemulihan diberikan pembekalan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM. Target petugas penyelenggara layanan (AP) IBM yang terlatih pada tahun 2024 sebanyak 10 orang, sedangkan realisasi adalah 10 orang sehingga mencapai realisasi 100%.

Analisis Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun –tahun sebelumnya



Tidak ada target kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada tahun 2021 dan 2022, namun berdasarkan DIPA seksi rehabilitasi

ditahun tersebut seksi rehabilitasi telah memberikan pembekalan bagi tim AP tahun 2021 dikelurahan Kampung Salo sebanyak 5 orang dan tahun 2022 di IBM Kelurahan Punggaloba sebanyak 6 orang. Jumlah target petugas penyelenggara layanan IBM terlatih tahun 2023 adalah 5 orang sedangkan realisasi 11 orang yang mencapai 220%. Dan pada tahun 2024 realisasi tercapai 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih pada tahun 2024 adalah 10 orang sudah melampaui dengan target restra yaitu 5 orang jadi realisasi kinerja untuk petugas penyelenggara layanan IBM terlatih telah tercapai 200%.

Analisis Keberhasilan mencapai Target Kinerja

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih telah melampaui target hal ini ditunjang karena adanya anggaran pada DIPA fungsi rehabilitasi, petugas pendamping yang menjadi fasilitator pada saat bimbingan teknis petugas agen pemulihan serta kerjasama dengan pemerintah Kelurahan diwilayah IBM yang terbentuk.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja :

- Perlunya Meningkatkan kompetensi Agen pemulihan dalam pelayanan;
- Sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung.

Analisis Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja :

- Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder terkait mengenai tempat pelaksanaan IBM;
- Mengupayakan agar para Agen pemulihan dapat mendapatkan bimbingan teknis dalam pelayanan.

6. Sasaraan Strategis	Meningkatnya aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
------------------------------	--

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dapat membahayakan bagi pengguna apabila berlanjut menjadi ketergantungan /kecanduan. Akibat ketergantungan terhadap zat narkotika ini akan memberikan dampak negative baik secara fisik, psikis dan social lainnya. Pengaruh pada fungsi fisik akan menimbulkan komplikasi pada fungsi organ tubuh, sedangkan pengaruh pada psikis akan bermanifestasi pada gangguan prilaku. Semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan social, yakni munculnya tindak kejahatan dan persoalan sosial lainnya.

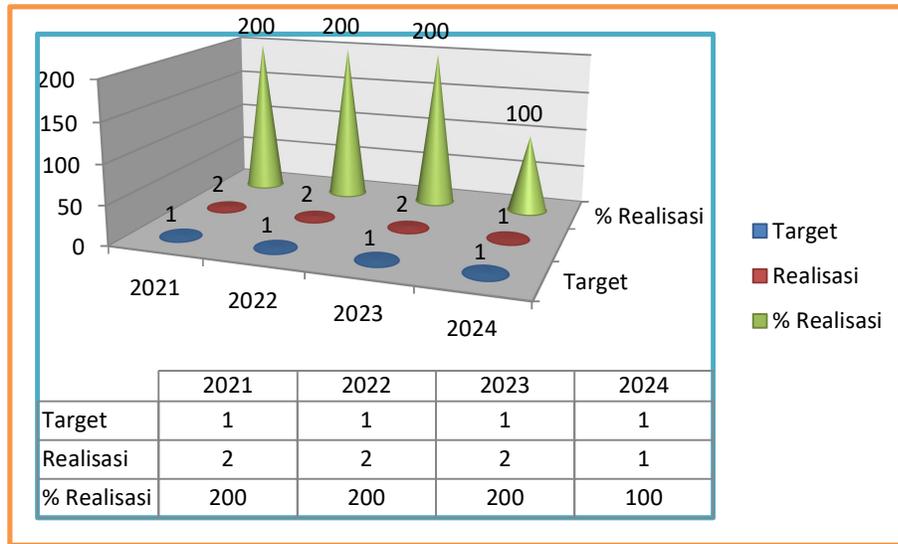
Di Kota Kendari peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga terjadi, Data penyalahguna yang menjalani rehabilitasi tahun 2024 berjumlah 77 orang dimana 5 orang yang menjalani rawat inap. Peningkatan ini disebabkan masyarakat semakin menyadari akibat buruk dari Penyalahguna Narkoba dengan mengakses layanan rehabilitasi. Untuk menunjang hal tersebut, BNN Kota Kendari berupaya untuk memberikan layanan rehabilitasi secara menyeluruh bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika melalui penyediaan layanan sesuai standar SNI 8807 dan pembinaan bagi petugas yang ada difasilitas rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BNN Kota Kendari.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
6.	Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1	1	100%

Salah satu tugas dan fungsi bidang rehabilitasi adalah memberikan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun lembaga komponen masyarakat yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Bimbingan teknis diberikan agar lembaga dapat tetap operasional dan layanan yang diberikan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Berdasarkan

perjanjian kinerja tahun 2024 target Lembaga rehabilitasi yang operasional adalah 1 lembaga, dan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional ada 1 lembaga yakni Klinik Pratama BNNK Kendari dengan jumlah klien 77 orang. Perbandingan target dan realisasi telah mencapai 100%. BNN Kota Kendari melakukan pembinaan dengan target Lembaga binaan sesuai daftar isian perencanaan anggaran (DIPA) sebanyak 2 lembaga. yakni Puskesmas Poasia dan Puskesmas Mokoau pembinaan telah dilaksanakan terhadap kedua lembaga tersebut.

Analisis Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Tahun sebelumnya.



Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024

Dari Data capaian tahun 2024 yaitu 1 lembaga dan target Restra 2024 sebanyak 1 lembaga maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Keberhasilan pencapaian target Kinerja

Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional dapat mencapai target ditunjang dengan pembinaan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh petugas pada fungsi rehabilitasi terhadap Lembaga penyelenggara layanan rehabilitasi.

Meskipun dapat di katakan berhasil, akan tetapi capaian tersebut belum optimal dan masih menghadapi kendala sebagai berikut:

1. Petugas dari Puskesmas Mokoau dan puskesmas poasia mempunyai tugas dan fungsi yang banyak sehingga layanan untuk rehabilitasi kurang maksimal.
2. Tidak adanya anggaran untuk penjangkauan klien pada puskesmas.

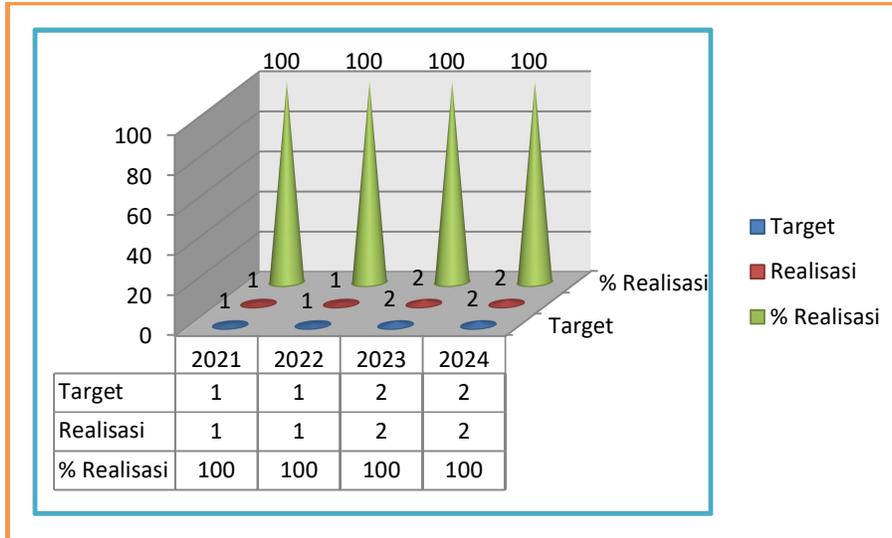
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan langkah antisipasi antara lain:

1. dilakukan evaluasi terhadap dua puskesmas tersebut karena belum operasional sehingga perlu dilakukan evaluasi perjanjian kerjasama.
2. Melakukan koordinasi pada dua puskesmas tersebut untuk meminta komitmen dalam pelayanan rehabilitasi.

Indikator Kinerja : Unit Intervensi berbasis Masyarakat yang terbentuk Target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
7.	Jumlah Unit Penyelenggara layanan IBM yang operasional	2	2	100%

Salah satu kebijakan dan strategi bidang Deputi Rehabilitasi BNN RI dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah dengan mengembangkan kebijakan baru melalui peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM merupakan upaya pemulihan ketergantungan narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan kearifan lokal. BNN Kota Kendari ditargetkan membentuk dua unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) dan saat ini telah dibentuk 2 unit IBM sesuai target sehingga realisasi pembentukan unit IBM telah mencapai 100%. IBM yang terbentuk berlokasi di Kelurahan Wua-wua dan Kelurahan Lepo-lepo. Kedua unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) telah operasional. Untuk kelurahan Lepo-lepo yakni IBM Waraka telah melayani 5 orang Klien dan IBM Morini Kelurahan Wua-wua Melayani 5 orang klien. Klien yang dilayani pada ke dua IBM tersebut adalah penyalahguna tingkat ringan.



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa selama 4 tahun berturut-turut untuk Unit Intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang operasional mencapai capaian kinerja sebesar 100%. Begitu pula jika dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan Target Restra 2 unit maka capaiannya mencapai 100%.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional (*Benchmark*) :

Berdasarkan hasil evaluasi Operasionalisasi Unit IBM tahun 2024 dari keseluruhan IBM yang operasional berjumlah 418 Unit secara Nasional (*benchmark* kinerja. Dan Untuk BNN Kota Kendari Puskesmas Wua-wua Masuk Kategori Tangguh (Jumlah IBM yang Tangguh 221 Unit) dan Puskesmas Lepolepo Masuk Kategori Berkembang (Jumlah IBM Berkembang 49 Unit).



Analisis Keberhasilan mencapai target kinerja

Realisasi kinerja Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dapat tercapai dengan baik karena adanya Kerjasama yang baik dengan stakeholder di wilayah Kecamatan Wua-wua dan Kecamatan Baruga serta partisipasi aktif dari agen pemulihan yaitu anggota masyarakat untuk membantu para pecandu narkoba agar dapat pulih dari ketergantungan.

Analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya :

- Melakukan Sosialisasi kepada Instansi Pemerintah dan Komponen masyarakat yang terkait dengan Program IBM yang akan dilaksanakan pada wilayah tertentu;
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program P4GN yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga rehabilitasi (IBM)
- Adanya Komponen masyarakat yang telah menjadi pecandu atau kurir pada wilayah tersebut.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dan dengan kelompok masyarakat dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba;
- Anggaran IBM yang masih kurang;
- Peralatan /perlengkapan kegiatan dan layanan IBM yang masih kurang memadai.

Analisis upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja ke depannya :

Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan..

8. Sasaraan Strategis	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika
------------------------------	---

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan layanan Klinik rehabilitasi BNN kota Kendari

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
8	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Kendari	3,42	3,59	104,97%

Defenisi Operasional : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Pengukuran Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan Rehabilitasi atau bisa disebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Lembaga Rehabilitasi dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat. Aplikasi IKM merupakan aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam proses pengumpulan dan pengolahan data dari responden, sehingga dapat menghasilkan statistik dan laporan dalam bentuk digital yang mudah diakses dan digunakan. “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Rehabilitasi Narkotika adalah data dan informasi tentang Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Rehabilitasi yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan metode pencacahan.”

Survey kepuasan klien merupakan kegiatan pengukuran yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan klien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan. Pengukuran kepuasan layanan rehabilitasi di BNNK Kendari merupakan tugas dan tanggungjawab fungsi Rehabilitasi sebagai pelaksana layanan rehabilitasi dan menjadi target kinerja dari Kepala BNNK Kendari. Jumlah klien rawat jalan yang menjadi responden pada semester I periode januari - Desember 2024 sebanyak 77 orang dengan capaian 3,59. Target IKM berdasarkan perjanjian kinerja

Kepala BNNK Kendari adalah 3,42 sehingga untuk dapat dinyatakan bahwa kepuasan layanan di BNN Kota Kendari pada tahun 2024 telah mencapai target sebesar 104,97%.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner elektronik (e-survei) yang disebarakan kepada pengguna layanan melalui link Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/>. Link IKM terbagi menjadi 2 bagian yaitu IKM Dewasa dan IKM Anak. Hal ini berdasarkan kategorisasi usia / umur dimana IKM Dewasa dimulai dari usia 18 tahun keatas (\geq 18 Tahun) dan IKM Anak dimulai dari usia 7 sampai dengan 17 tahun (7-17 Tahun). Pertanyaan dalam Kuesioner IKM terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner penerima layanan rehabilitasi yaitu :

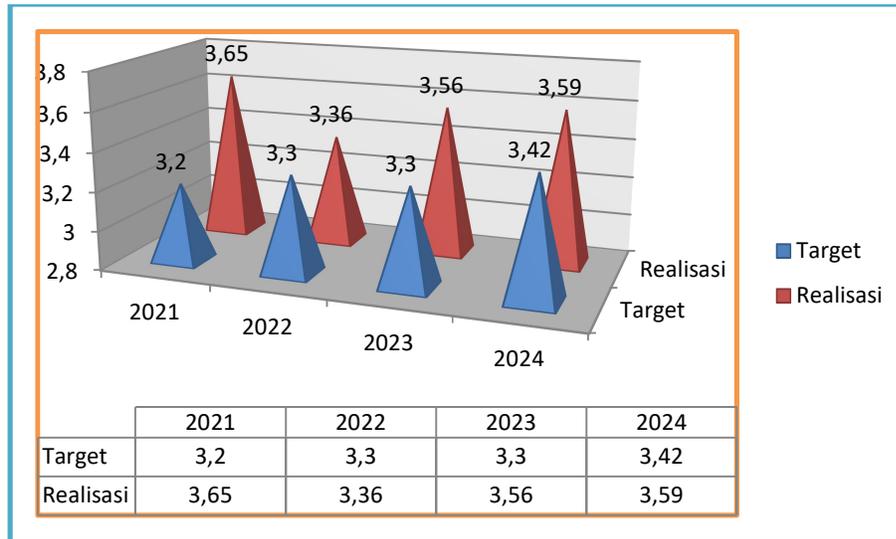
1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Setelah dilakukan pengumpulan data maka pengelola data atau admin harus melakukan verifikasi data pada link <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/login> agar data responden yang masuk dapat diolah kedalam aplikasi IKM BNN.

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25-100)	Nilai Interval (1-4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 – 100,00	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik
76,61 – 88,30	3,065 – 3,532	B	Baik
65,00 – 76,60	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
25,00 – 64,99	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.



Sedangkan Jika dibandingkan dengan Target Restra untuk Indikator kinerja Kepuasan layanan Klinik rehabilitasi BNN Kota Kendari adalah 3,20 sedangkan realisasi untuk tahun 2024 sebesar 3,59 jadi persentase realisasi antara Target Restra dan realisasi tahun 2024 sebesar 112,18%.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional (Benchmark) :

Realisasi kinerja secara nasional (*Benchmark*) dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi yaitu 3,53 untuk tahun 2024 sedangkan realisasi indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN kota Kendari adalah 3,59 jadi persentase perbandingannya adalah 101,70%.

Analisis Keberhasilan mencapai target kinerja :

Keberhasilan dari Indikator Kinerja Indeks Kepuasan layanan Klinik rehabilitasi BNN Kota Kendari antara lain adalah partisipasi Klien untuk mengikuti proses rehabilitasi dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan, adanya motivasi klien untuk berubah atau dapat pulih dari ketergantungan, adanya petugas Rehabilitasi Klinik BNN Kota Kendari yang kompeten dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Analisis atas keberhasilan / kegagalan mencapai target beserta upaya nyata dan/ atau hambatanya :

- Kemudahan persyaratan administrasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.
- Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses layanan rehabilitasi.
- Dalam mengisi kuisoner secara online, jaringan kurang maksimal.
- Dalam pengisian kuisoner, petugas melakukan pendampingan terhadap klien dikarenakan pertanyaan kuisoner yang tidak dimengerti.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya mencapai kinerja :

- Menyediakan kuisoner secara hardcopy;
- Memfasilitasi free wi-fi dan media (smartphone dan atau komputer) untuk pengisian kuisoner;
- Melakukan pendampingan selama partisipan mengisi kuisoner.
- Meningkatkan Koordinasi petugas dengan BNN RI

Analisis Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja:

- Senantiasa meningkatkan kualitas layanan guna mewujudkan layanan prima bagi klien;
- Petugas memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami responden dalam pengisian kuesioner.

9. Sasaran Strategis	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	% Realisasi
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari	90	99,04	110,04

Nilai Kinerja anggaran adalah nilai aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran kinerja anggaran kementerian dan lembaga. Nilai kinerja anggaran BNN merupakan nilai akumulatif dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari Nilai Efektifitas yaitu capain Rincian Output dan Nilai Efisiensi yaitu Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dihitung dari 8 (delapan) komponen yaitu :

- ✚ Revisi Dipa
- ✚ Penyerapan anggaran
- ✚ Penyelesaian Tagihan
- ✚ Dispensasi SPM
- ✚ Deviasi Hal. 3 DIPA
- ✚ Belanja Kontraktual
- ✚ Pengeloan UP dan TUP
- ✚ Capaian Output

Adapun Capaian dari Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel di bawah dari Aplikasi SMART KEMENKEU.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	99,65	98,42	99,04



Capain Nilai Perencanaan dapat dilihat pada Tabel di bawah .

MONEV | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) | Role | Pilih TA (2024) | Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja | Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri | Cari:

[Download Excel](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	99,65	99,53	100,00	100,00	

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

MONEV | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) | Role | Pilih TA (2024) | Logout

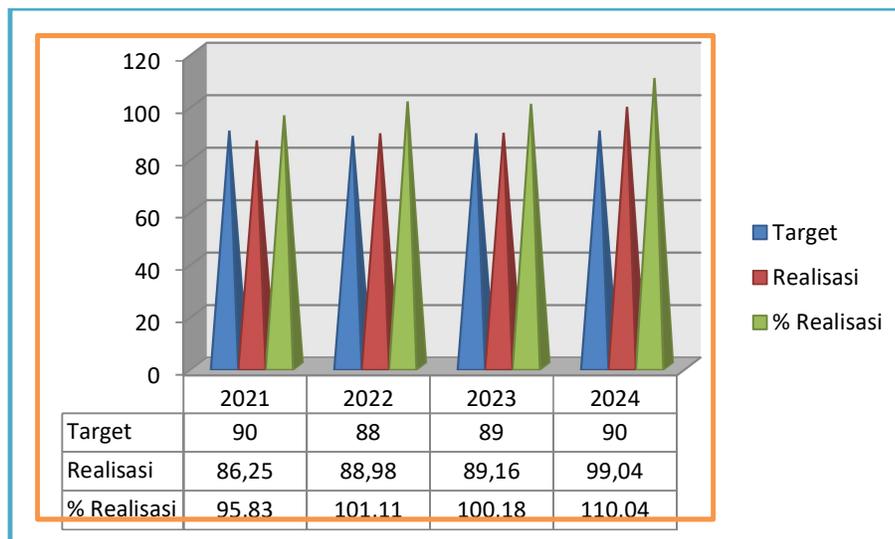
Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN WAJIB | Desember | [Tampilkan](#)

[Download PDF](#) | [Download Excel](#)

Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
3	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	Nilai Bobot	100,00	94,67	100,00	93,33	100,00	99,73	99,67	98,42	100%	0,00	98,42	
			Nilai Akhir	10,00	14,20	20,00	9,33	10,00	9,97	24,92					
			Nilai Aspek		97,34			98,27		99,67					

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan capaian Kinerja Tahun- tahun sebelumnya



Dari Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan realisasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan target Restra, capaian kinerja untuk Nilai Kinerja Anggaran sebesar 110,04%.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi nasional (*Benchmark*) :

Berdasarkan hasil realisasi nilai Nilai Kinerja Anggaran secara nasional adalah sebesar **98,15** dan dibandingkan dengan nilai Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari pada tahun 2024 sebesar 98,42 berarti persentase Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari sebesar 100,27%.

Analisis Kinerja keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja :

- Adanya Koordinasi dan Kerjasama antara Perencana, tim teknis, dan bagian keuangan serta bagian pelaporan sehingga data yang dihasilkan dapat sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.
- Realisasi Capaian Output harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Analisis kualitas atas keberhasilan/kegagalan dan sumber daya dalam mencapai target kinerja:

- Kurangnya Personil bagian Perencanaan dan pelaporan yang mengerti tentang Proses Perencanaan dan Pelaporan.

- Tidak adanya pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Perencanaan dan Pelaporan sehingga Laporan yang dihasilkan kurang maksimal.

Analisis Perbaikan dan penyempurnaan kinerja :

- Penambahan Pegawai bagian Perencanaan dan pelaporan
- Mengikuti diklat perencanaan atau bimtek Pelaporan.

10. Sasaraan Strategis	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-------------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	% Realisasi
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari	98,42	96,92	101,54

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Kendari.

Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable dan bobot penilaian sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (25%):
 - Revisi DIPA (10%);
 - Deviasi Halaman III DIPA (15%);
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%):
 - Penyerapan Anggaran (20%)
 - Belanja Kontraktual (10%)
 - Penyelesaian Tagihan (10%)
 - Pengelolaan UP dan TUP (10%)

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%):

➤ Capaian Output (25%).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	060	066	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	Nilai	100.00	94.67	100.00	93.33	100.00	99.73	99.67	98.42	100%	0.00	98.42
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	14.20	20.00	9.33	10.00	9.97	24.92				
					Nilai Aspek	97.34		98.27		99.67						

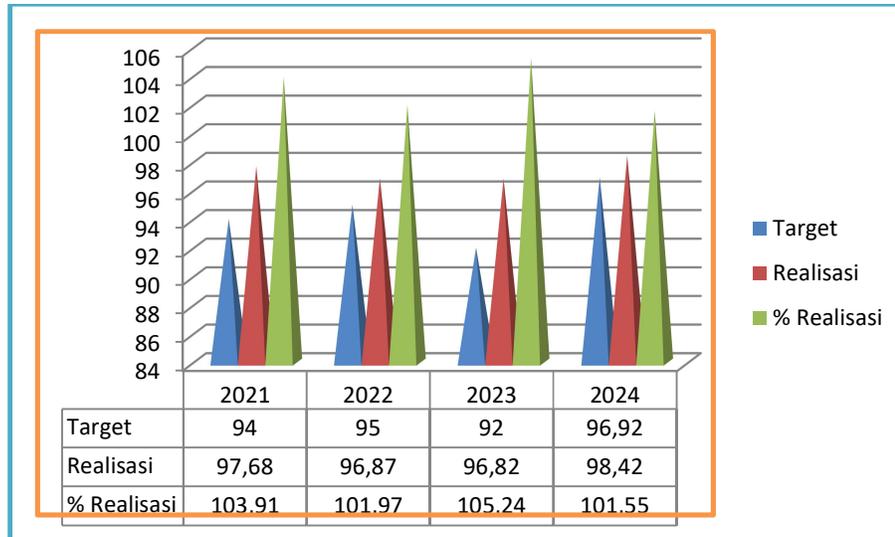
Tabel di atas menunjukkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Kendari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 98,42 atau dengan nilai Sangat Baik. Data tersebut diambil dari <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah :

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Renstra 2024	% Realisasi
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari	98,42	95	103,6

Berdasarkan Tabel di atas Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari jika di bandingkan dengan Target Renstra adalah 103,6% dalam Kategori Sangat Baik.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan capaian Kinerja Tahun sebelumnya:



Realisasi Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari jika dibandingkan dengan **Benchmark** BNN RI sebesar 100 maka nilai IKPA BNN Kota Kendari mencapai 98,42%.

Analisis kinerja dalam keberhasilan mencapai target kinerja :

- Optimalisasi anggaran yang diikuti dengan revisi anggaran yang tepat melalui koordinasi dengan BNN RI ;
- Konsultasi yang intensif dengan KPPN Kota Kendari dan Kanwil Perbendaharaan DJPB Prov. Sultra;
- Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan.

Analisis kualitas atas Keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan hambatannya :

- Adanya Koordinasi dan Kerjasama antara Perencana, tim teknis, dan bagian keuangan serta bagian pelaporan sehingga data yang dihasilkan dapat sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.
- Realisasi Capaian Output harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Analisis kualitas atas keberhasilan/kegagalan dan sumber daya dalam mencapai target kinerja:

- Kurangnya Personil bagian Perencanaan dan pelaporan yang mengerti tentang Proses Perencanaan dan Pelaporan.
- Tidak adanya pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Perencanaan dan Pelaporan sehingga Laporan yang dihasilkan kurang maksimal.

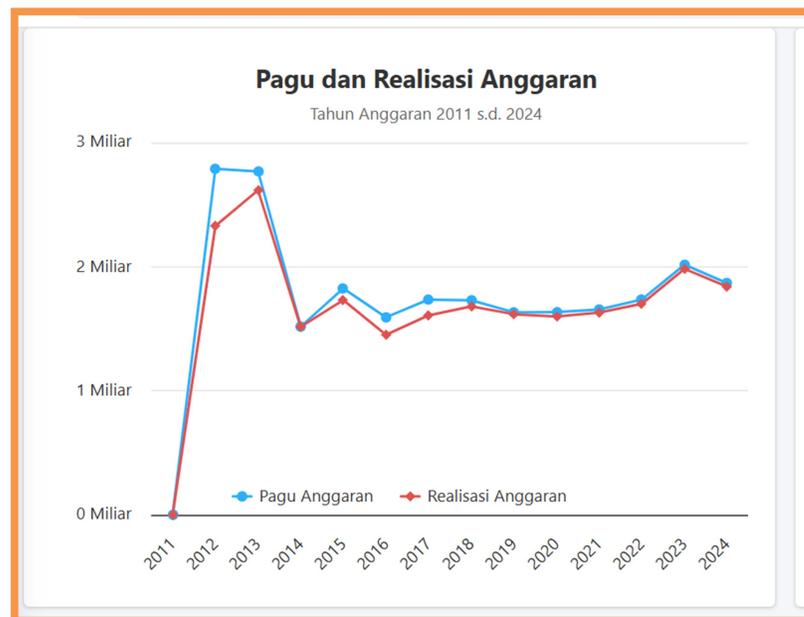
Analisis Perbaikan dan penyempurnaan kinerja :

- Penambahan Pegawai bagian Perencanaan dan pelaporan
- Mengikuti diklat perencanaan atau bimtek Pelaporan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

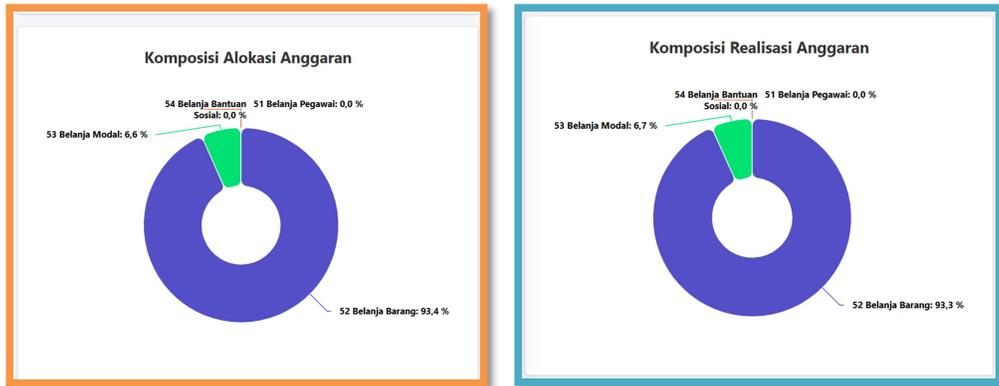
No	Jenias Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Barang	1.744.911.000	1.716.189.592	98,35	28.721.408	1,65
2	Belanja Modal	123.955.000	123.339.850	99,50	615.150	0,50
	Jumlah	1.868.866.000	1.839.529.442	98,43	29.336.558	1,57

Menunjukkan anggaran BNN Kota Kendari TA. 2024 yang terealisasi digunakan untuk belanja barang adalah Rp 1.716.189.592 atau 98.35%, sedangkan untuk belanja modal realisasi anggaran sebesar Rp.123.339.850 atau 99,50%.Jumlah realisasi Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program P4GN dan program DMTPL sebanyak 22 output kegiatan.



Kode Nama Kegiatan	Total			
	Pagu	Real	%	Sisa
3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	53.672.000	47.889.600	(89.23%)	5.782.400
3237 Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	5.440.000	5.439.000	(99.98%)	1.000
3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	6.356.000	5.690.000	(89.52%)	666.000
3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1.099.848.000	1.098.372.509	(99.87%)	1.475.491
3247 Penyelenggaraan Advokasi	106.000.000	104.500.000	(98.58%)	1.500.000
3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	7.550.000	6.500.000	(86.09%)	1.050.000
3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	162.550.000	162.550.000	(100.00%)	-
3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	22.275.000	22.275.000	(100.00%)	-
3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.800.000	14.800.000	(100.00%)	-
3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	310.375.000	294.673.333	(94.94%)	15.701.667
3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	10.000.000	8.540.000	(85.40%)	1.460.000
5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	70.000.000	68.300.000	(97.57%)	1.700.000

Realisasi anggaran BNN Kota Kendari sebesar Rp. **1.839.529.442,-** (98,43%) dari total Pagu Anggaran tahun 2024 yakni sebanyak Rp. **1.868.866.000,-**. realisasi serapan anggaran pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN sebesar 99,20% dan program P4GN sebesar 97,12%.



Dari Gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Komposisi alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar 6,6% dan belanja barang sebesar 93,4% dari total anggaran Tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan komposisi realisasi anggaran untuk belanja modal 6,7% dan belanja barang 93,3% dari total anggaran Tahun 2024.

NO	KODE	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00
2	3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
3	3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	1 Layanan	100,00
4	3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5	3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
6	3239.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00
7	3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00
8	3239.EBB.951	Layanan Sarana internal	5 Unit	5 Unit	100,00
9	3239.EBB.971	layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100,00
10	3239.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

11	3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00
12	3247.QDE.002	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	100,00
13	3247.UBB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2 Desa	2 Desa	100,00
14	3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	15 Orang	15 Orang	100,00
15	3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00
16	3258.BAA.002	Layanan Asesmen terpadu pelaku Tindak Pidana Narkotika	13 Orang	16 Orang	123,07
17	3259.PDG.001	Agen Pemulihan yang dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang	10 Orang	100,00
18	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNK Kota	40 orang	77 orang	192,50
19	3260.BAA.004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba	1254 Orang	1125 Orang	89,71
20	3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100,00
21	3260.BDB.004	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00
22	5936.QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terbentuk	10 Orang	10 Orang	100,00

Dari Tabel di atas terdapat 1(satu) Output tidak tercapai yaitu Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba sebesar 89,71% dan ada 2 (dua) Output yang melebihi target yaitu Output Layanan Asesmen terpadu pelaku tindak pidana Narkotika sebesar 123,07% dan Layanan rehabilitasi di Klinik BNN Kota Kendari sebesar 192,50%.

BAB IV

PENUTUP

Total realisasi kinerja BNN Kota Kendari adalah 99,04% termasuk kategori sangat baik. Hasil ini dicapai atas kerjasama semua stakeholder dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari. Kiranya informasi LKIP ini dapat dipakai sebagai input dalam pengambilan keputusan pemerintah dan unsur-unsur terkait baik lintas program maupun lintas sektor, khususnya Badan Narkotika Nasional dalam melakukan langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa mendatang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja dari BNN Kota Kendari, antara lain :

- ✚ Melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- ✚ Peningkatan Kerja sama dengan Instansi Pemerintah daerah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan organisasi lain agar berperan aktif dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- ✚ Meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi yaitu dengan sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral serta masyarakat hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

Saran

Untuk lebih memberikan informasi yang baik tentang *progress* atau perkembangan kinerja BNN Kota Kendari secara khusus dan kinerja BNN pada umumnya kiranya perlu adanya konsistensi penetapan indikator kinerja dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra BNN RI maupun renstra Satker BNN di daerah

LAMPIRAN



PERJANJIAN KERJA

BNN KOTA KENDARI

2024



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. MURNIATY .M, MPH., Apt
Jabatan : KEPALA BNN KOTA KENDARI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CHRIST REINHARD PUSUNG, S.I.K., M.Han., M.H.
**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

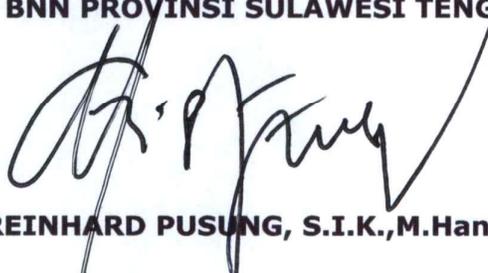
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
KEPALA BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA BNN KOTA KENDARI


CHRIST REINHARD PUSUNG, S.I.K., M.Han., M.H.


Dra. MU .RNIATY .M, MPH., Apt

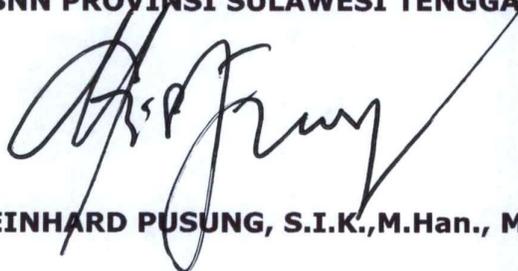
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,875 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,48 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	90 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.70.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.187.195.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.10.165.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.800.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.332.005.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.7.875.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.106.784.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.280.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.6.356.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.025.204.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA



CHRIST REINHARD PUSUNG, S.I.K., M.Han., M.H.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KOTA KENDARI



Dra. MU .RNIATY .M, MPH., Apt



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

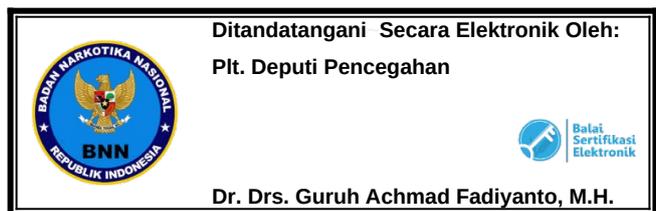
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

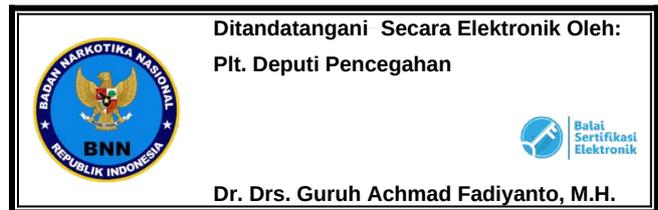
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

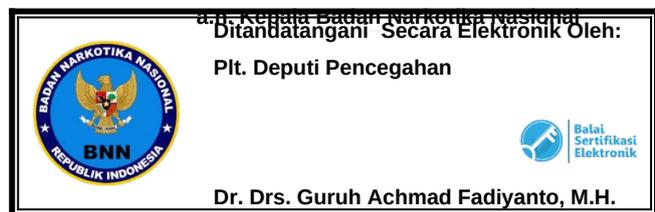
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

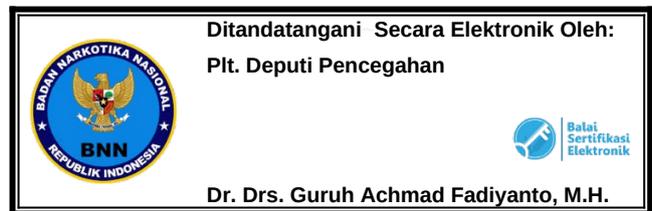
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

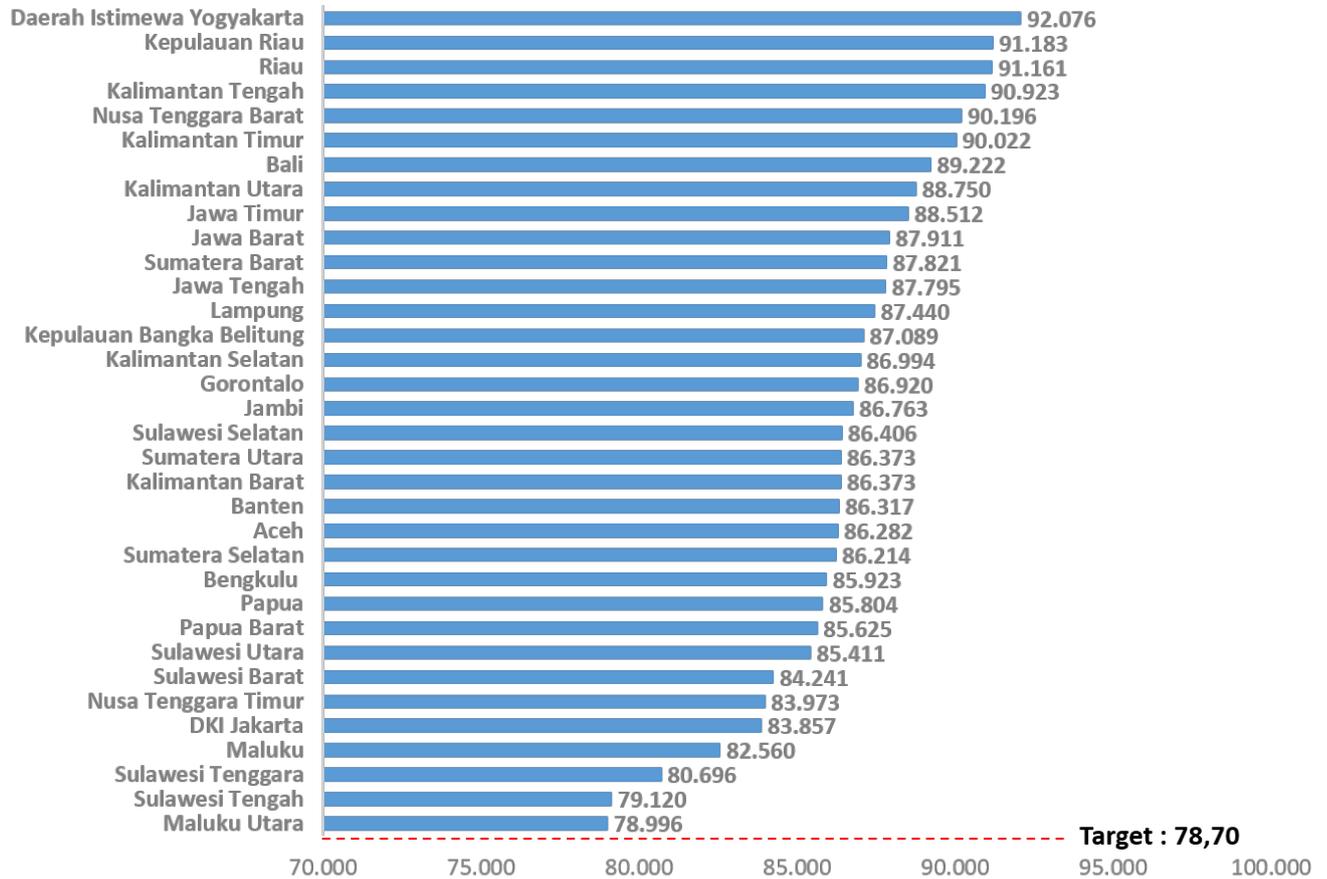
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI

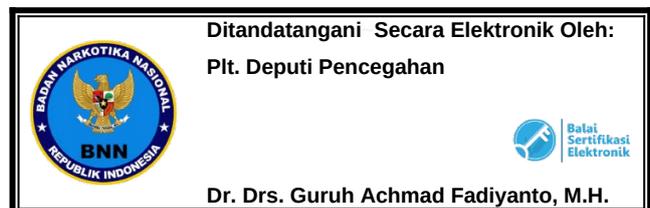
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

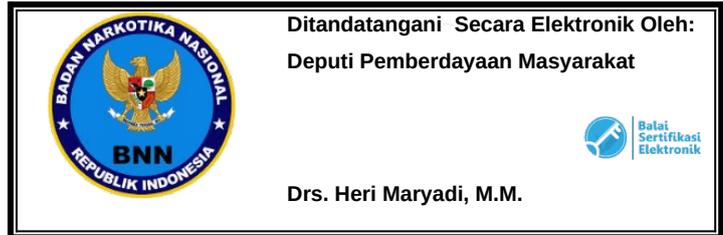
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat</p>
	
	<p>Drs. Heri Maryadi, M.M.</p>

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
Grand Total	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80

BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64		
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50		
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78		
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90		
BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56		
Riau	3.21	3.69	88.55		
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32		
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92		
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53		
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00		
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32		
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21		
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15		
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71		
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75		
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73		
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56		
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12		
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25		
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39		
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09		
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28		
Bengkulu	3.68	3.69	78.42		
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63		
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32		
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13		
Jambi	3.24	3.48	85.14		
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68		
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00		
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89		
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46		

Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63		
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94		
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75		
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00		
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50		
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97		
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11		
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45		
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23		
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69		
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44		
Lampung	3.6	3.65	83.85		
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96		
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52		
BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33		
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57		
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69		
BNNP Lampung	4	3.7	87.18		
Banten	3.93	3.57	76.30		
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63		
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69		
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42		
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42		
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79		
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24		
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11		
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48		
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05		
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20		
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22		
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31		

BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64		
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88		
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64		
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32		
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27		
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75		
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00		
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69		
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23		
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69		
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28		
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54		
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78		
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40		
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15		
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19		
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53		
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00		
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10		
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85		
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75		
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85		
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19		
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40		
D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64		
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27		
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42		
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25		
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38		
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46		
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26		

BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90		
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28		
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82		
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81		
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67		
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50		
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50		
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17		
BNN Kabupaten Trenggalek	3.99	3.57	91.67		
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93		
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78		
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59		
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88		
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70		
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65		
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37		
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54		
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79		
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84		
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81		
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83		
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48		
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19		
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53		
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36		
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63		
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69		
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32		
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78		
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00		
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61		

BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75		
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41		
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92		
BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79		
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55		
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64		
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06		
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64		
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01		
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05		
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85		
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85		
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50		
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03		
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66		
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67		
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09		
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00		
Bali	3.72	3.65	91.18		
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28		
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00		
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45		
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00		
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00		
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26		
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06		
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95		
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81		
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67		
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75		
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80		

BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59		
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18		
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00		
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00		
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00		
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77		
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83		
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00		
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17		
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57		
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82		
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27		
Gorontalo	3.2	3.5	77.17		
BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75		
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88		
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33		
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50		
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00		
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13		
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22		
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00		
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67		
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56		
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44		
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58		
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30		
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72		
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83		
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46		25.00		
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48		
BNN Kabupaten Morowali	1.89	3.24	92.86		

BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00		
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51		
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28		
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97		
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14		
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07		
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09		
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75		
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86		
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44		
Maluku	3.23	3.22	72.00		
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00		
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22		
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35		
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64		
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00		
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57		
Papua	3.29	3.68	97.47		
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24		
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75		
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46		
Papua Barat	3.66	3.64	100.00		
Pusat	3.66	3.53	66.11		
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99		
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11		
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97		
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76		
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25		
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69		



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Capaian fase perkembangan unit IBM

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

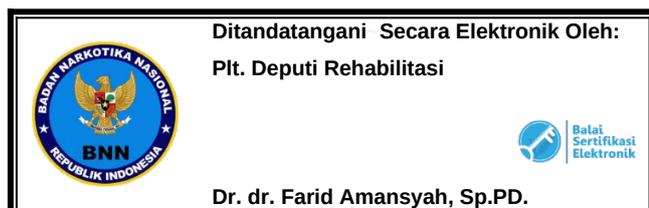
h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
Prima (99 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim	Sei Dadap	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Hasak		Asahan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
20	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
21	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
22	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
24	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
25	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
30	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
31	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
32	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
33	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
34	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
35	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
36	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
37	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
38	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
39	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
40	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
41	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
47	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
48	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
49	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
52	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
53	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
54	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
55	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
56	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
58	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul
59	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
60	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
61	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
62	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
63	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
64	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
65	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar
66	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
67	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
68	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
69	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
70	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
71	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
72	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
73	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
74	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
75	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
76	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
77	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
78	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
79	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
80	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Kecamatan Jambangan	Kota Surabaya
81	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Kecamatan Rungkut	Kota Surabaya
82	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
83	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
85	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
86	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
87	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
88	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
89	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
90	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
91	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan	Palu Utara	Kota Palu

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Mamboro Barat		
92	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
93	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
94	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
95	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
96	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
97	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
98	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
99	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
Tangguh (221 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP ACEH	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
12	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
16	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
17	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
18	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
19	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
33	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
36	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
37	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
38	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
40	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
41	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Kandis	Kandis	Kabupaten Siak

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Kota		
42	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
43	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
44	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
45	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
46	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
47	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
48	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
49	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
50	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
51	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
52	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
53	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
54	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi
56	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
57	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
58	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
59	Sumatera Selatan	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin
60	Sumatera Selatan	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Desa Gasing	Talang Kelapa	Banyuasin
61	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
62	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
63	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
64	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Gula Baru	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
65	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
66	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Selatan
67	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur
68	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
69	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
70	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
71	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
72	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
73	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
74	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
75	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
76	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
77	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
78	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
79	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
80	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
81	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
82	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
83	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
84	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
85	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
86	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
87	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
88	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
89	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
90	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
91	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Jakarta Barat
92	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
93	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
94	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
95	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
96	Banten	BNNP BANTEN	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
97	Banten	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
98	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
99	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
100	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
101	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
102	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
103	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
104	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
105	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
106	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
107	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
108	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
109	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
110	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
111	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
112	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
113	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
114	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisolak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
115	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Cina		
116	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
117	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
118	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
119	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
120	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
121	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
122	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta
123	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
124	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
125	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
126	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
127	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
128	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
129	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
130	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
131	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
132	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
133	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Pandanarum	Tempeh	Kabupaten Lumajang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
135	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
136	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
137	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
138	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
139	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
140	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
141	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
142	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
143	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Kalimook	Kalianget	Sumenep
144	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
145	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
146	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
150	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
151	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggul	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
157	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
158	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
159	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
160	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
161	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
162	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
163	Kalimantan	BNN Kab. Barito	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Selatan	Kuala			Barito Kuala
164	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
165	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
166	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
167	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
168	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
169	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
170	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
171	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
172	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
173	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
174	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
175	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
176	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
177	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
178	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
179	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
180	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
181	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado
182	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karame	Singkil	Kota Manado
183	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
184	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
185	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
186	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
187	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
188	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
189	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
190	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
193	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
194	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
195	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
196	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
200	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
201	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
202	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
203	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
204	Maluku	BNNP MALUKU	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
205	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
206	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar El	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
210	Bali	BNNP BALI	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
211	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
212	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram

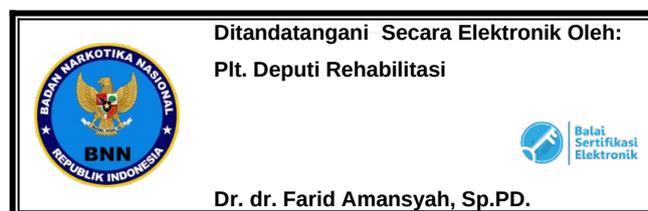
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
213	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
221	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kelurahan Manokwari Barat	Kecamatan Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
Berkembang (49 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
14	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
16	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
19	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
20	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
23	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
26	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja
27	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
28	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
29	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
30	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
31	Maluku	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
32	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
33	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
34	Bali	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
35	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
36	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
37	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
38	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
39	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
40	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
41	NTB	BNN Kab.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
		Sumbawa			Sumbawa
42	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
43	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
44	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
45	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
46	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
47	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	Papua	BNN Kab. Mimika	Inauga	Wania	Mimika
49	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
Tumbuh (32 unit)					
1	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
4	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
7	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
8	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoarjo	Kota Kediri
9	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
10	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Nipah-Nipah	Kecamatan Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
13	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
14	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
15	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
17	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
18	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
19	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
20	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
21	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
22	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
23	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
24	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
25	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
26	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
27	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
28	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
29	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Papua	BNN Kab. Mimika	Sempan	Mimika Baru	Mimika
32	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
Rintisan (15 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Ie Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
3	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
5	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Benda Baru	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
6	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Benda	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
7	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
8	Kalimantan	BNN Kota Bontang	Kelurahan	Bontang Barat	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Timur		Belimbing		
9	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
10	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
11	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
12	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
13	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
14	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
15	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
Pra Fase (2 unit)					
1	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
2	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara



REKAPITULASI CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0	2	0	0	10	10
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	21	10
3	Sumatera Barat	0	0	1	0	8	1
4	Riau	0	0	0	0	10	0
5	Jambi	0	0	0	0	8	0
6	Sumatera Selatan	0	1	4	7	7	1
7	Lampung	0	0	0	1	10	1
8	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	0	5	3
9	Kepulauan Riau	0	0	1	0	7	0
10	Bengkulu	0	0	0	2	3	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	5	3
12	Banten	0	2	0	1	7	0
13	Jawa Barat	0	0	0	2	18	11
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	9	11
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Timur	0	0	1	0	14	22
17	Kalimantan Barat	0	0	0	8	6	2
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	13	1
20	Kalimantan Timur	0	1	4	0	2	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	4	2
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	9	1
23	Sulawesi Tengah	0	2	3	1	3	5
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	6	0
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	7	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	4	0
27	Maluku	0	0	0	3	3	0

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tanggung	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Maluku Utara	2	0	3	0	3	0
29	Bali	0	2	4	2	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2	2
31	NTT	0	2	3	3	0	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6	0
33	Papua	0	1	2	3	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2	0



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Plt. Deputi Rehabilitasi



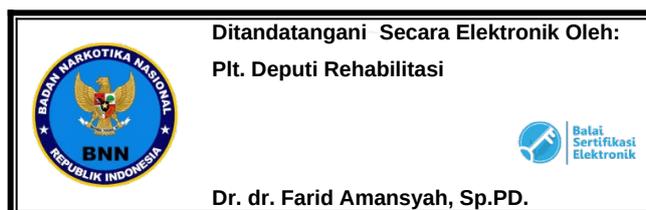

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

GAMBARAN KEGIATAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024



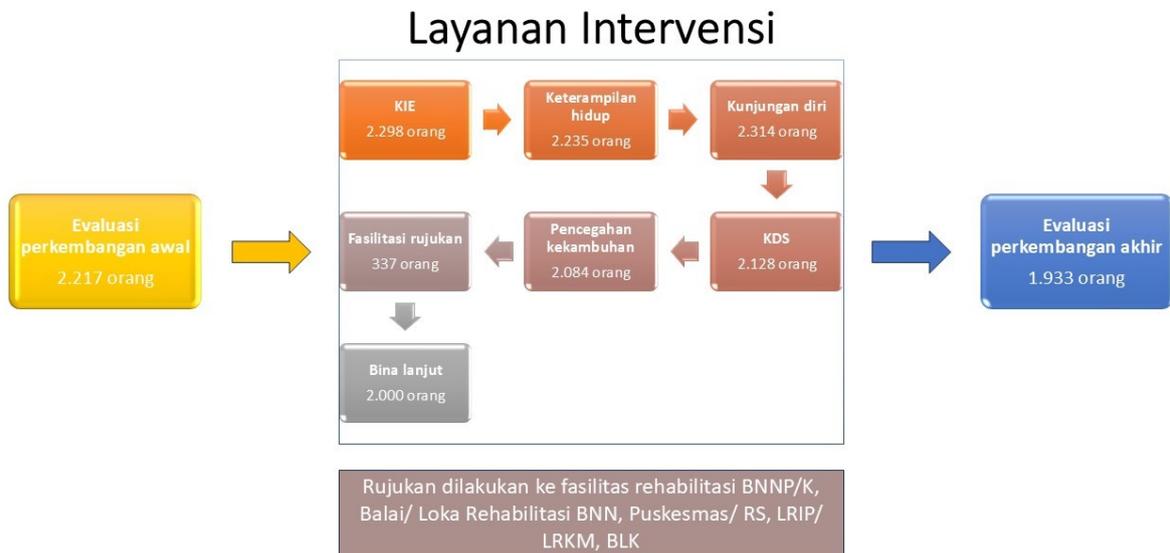
Kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota di tahun 2024 adalah:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 3.277 kali, dengan total peserta/ audiens sejumlah 73.749 orang. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal, serta menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.330 kali di 1.853 RT/ dusun/ banjar, dan memperoleh informasi estimasi jumlah penyalah guna narkotika sebanyak 6.613 orang. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.073 orang penyalah guna narkotika, dan yang bersedia ditindaklanjuti untuk masuk dalam layanan IBM adalah 2.346 orang. Kegiatan ini bertujuan mendekati penyalah guna narkotika dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan IBM. Secara umum, alasan para penyalah guna narkotika menolak mengikuti layanan di IBM antara lain karena merasa belum siap, malu, takut ditangkap polisi, tidak terganggu dengan penyalahgunaan zatnya, tidak diizinkan keluarga, atau sibuk bekerja.



GAMBARAN LAYANAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

Skrining & Penerimaan Awal



Layanan intervensi bagi penyalah guna narkoba di IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota, dengan gambaran berikut:

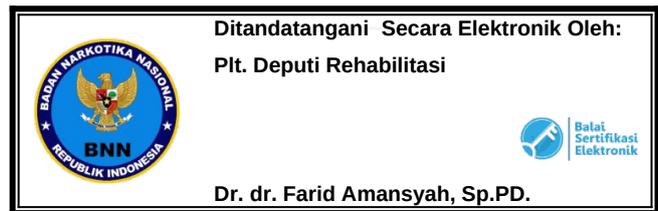
- Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gangguan penggunaan narkoba menggunakan instrumen *Drug Abuse Screening Test* (DAST-10). Jumlah penyalah guna yang diskринing adalah 2.579 orang, dengan hasil:

- Tidak teridentifikasi adanya resiko : 97 orang (3,76%)
- Rendah : 2.158 orang (83,68%)
- Sedang : 243 orang (9,42%)
- Tinggi : 78 orang (3,02%)
- Sangat tinggi : 3 orang (0,12%)

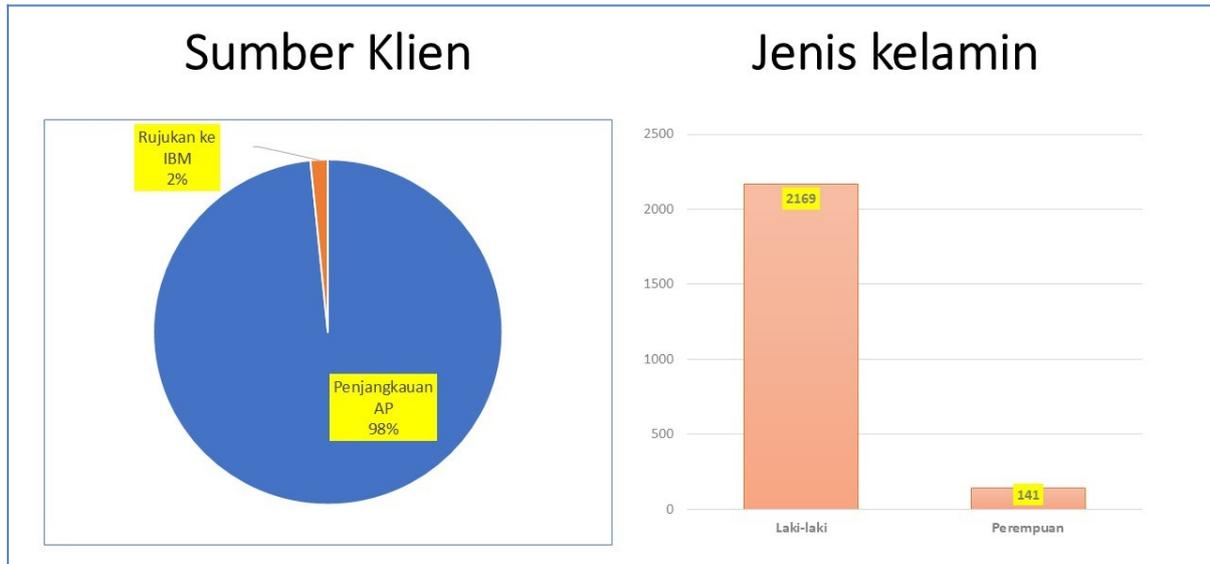
Klien yang dilayani di IBM adalah klien yang berada dalam kategori risiko Rendah hingga Sedang, dengan pendampingan petugas BNNP dan BNNKab/Kota.

- Penyalah guna yang telah diskriminasi dan dirujuk ke IBM untuk mengikuti layanan sebagai klien berjumlah 2.310 orang, semuanya telah mengikuti rangkaian Penerimaan Awal yaitu pengisian formulir registrasi, surat pernyataan kesediaan mengikuti layanan, serta formulir roda kehidupan.
- Klien IBM mengikuti layanan dalam waktu 16 minggu, terdiri dari:
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah diikuti oleh 2.298 orang klien. KIE bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan mendorong perubahan sikap dan perilaku klien.
 - Keterampilan Hidup telah diikuti 2.235 orang klien, bertujuan membekali klien IBM dengan *soft skill* agar dapat kembali beradaptasi, produktif dan melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
 - Kunjungan diri telah diikuti 2.314 orang klien, yang bertujuan membina hubungan, melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi klien dalam lingkungannya sehari-hari. Kunjungan diri juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data/ informasi tentang klien melalui wawancara dengan klien dan/ atau dengan anggota keluarga serta hasil observasi lingkungan tempat tinggal klien.
 - Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah diikuti 2.128 orang klien secara berkelompok, bertujuan mendorong anggota kelompok untuk saling memberikan dukungan, bertukar pengalaman dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan harapan satu sama lain.
 - Pencegahan kekambuhan diikuti 2.084 orang klien secara berkelompok, yang bertujuan membantu klien mengenal faktor pemicu, cara menghindarinya dan membangun keterampilan untuk mengatasi rasa ketagihan serta keterampilan menolak narkoba.
 - Sebanyak 337 orang klien difasilitasi untuk rujukan, antara lain ke fasilitas rehabilitasi BNNP & BNNK/ Kota, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, Puskesmas/ RS, Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah/ komponen masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja para klien agar bisa mandiri dan produktif secara ekonomi.

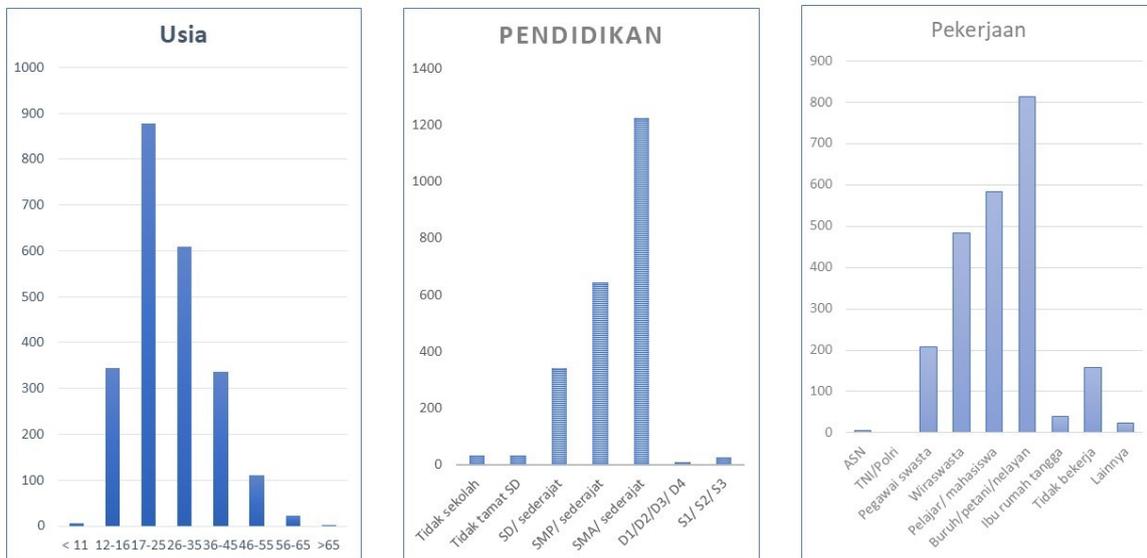
- Sebanyak 2.000 orang (86,58% dari jumlah klien) telah mengikuti rangkaian layanan bin a lanjut, yaitu penilaian pascarehabilitasi, pemantauan, pendampingan pemulihan, dan t erminasi yang dilakukan secara simultan oleh AP dan petugas BNNP & BNNK/ Kota
- Sebanyak 2.217 orang klien dilakukan evaluasi perkembangan tahap awal yaitu URICA, WHO-QoL, dan tes urin. Sementara klien yang telah dilakukan evaluasi perkembangan t ahap akhir adalah 1.933 orang
- Pemulihan penyalah guna narkoba tidak mungkin lepas dari keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat. Pada tahun 2024, jumlah anggota keluarga/ orang terdekat yang dili batkan dalam layanan di IBM adalah 1.819 orang, terdiri dari orang tua, kakak, adik, sua mi/ istri, paman/ bibi atau guru. Beberapa klien IBM memilih untuk tidak melibatkan kelua rga dengan alasan takut, malu, atau berdomisili jauh dari keluarga.



GAMBARAN PROFIL KLIEN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

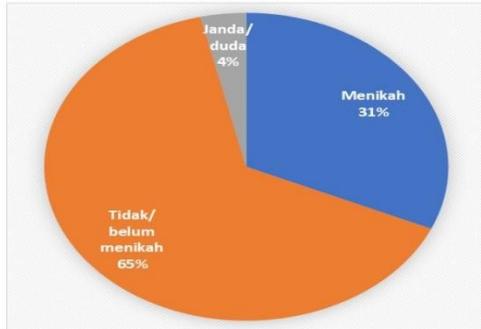


Total klien IBM pada tahun 2024 adalah 2.310 orang. Mayoritas merupakan hasil penjangkauan Agen Pemulihan, dan berjenis kelamin laki-laki.

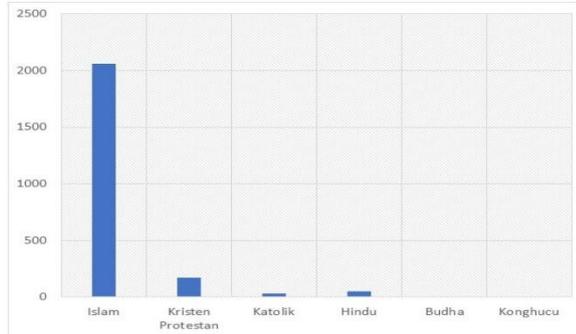


Mayoritas klien berada pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan Pendidikan terakhir mayoritas adalah SMA/ sederajat, dan pekerjaan saat ini adalah buruh/ petani/ nelayan

Status Pernikahan

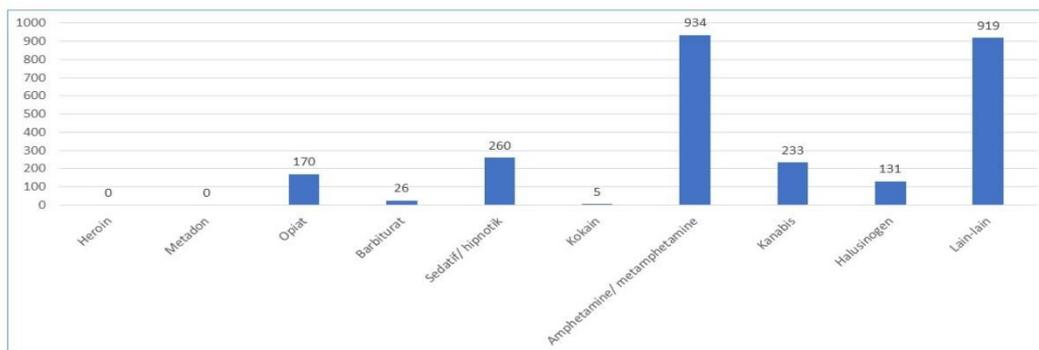


Agama



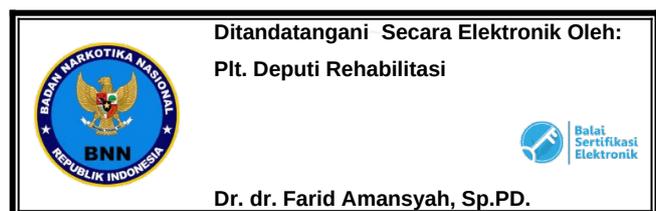
Mayoritas klien berstatus tidak/ belum menikah, dan mayoritas agama klien adalah Islam

Jenis zat yang digunakan saat ini



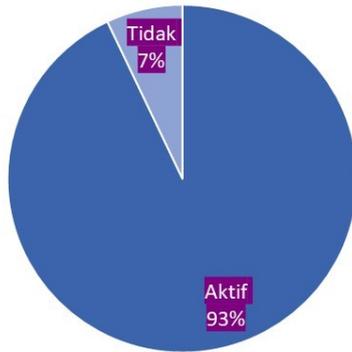
Ket: lain-lain mencakup alkohol, obat tanpa resep, inhalansia, komix, samcodin, zenith, bensin, tembakau gorilla, hexymer, tramadol, kratom, LL, carisoprodol, DMP

Jenis zat terbanyak yang digunakan oleh klien IBM adalah shabu, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik seperti benzodiazepine, dan ganja

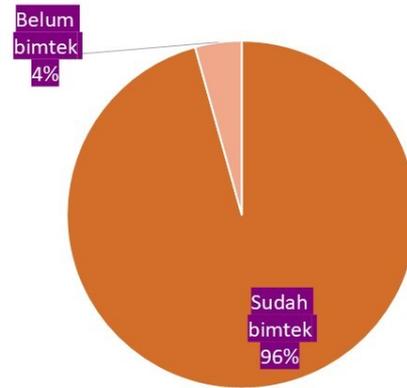


**GAMBARAN AGEN PEMULIHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

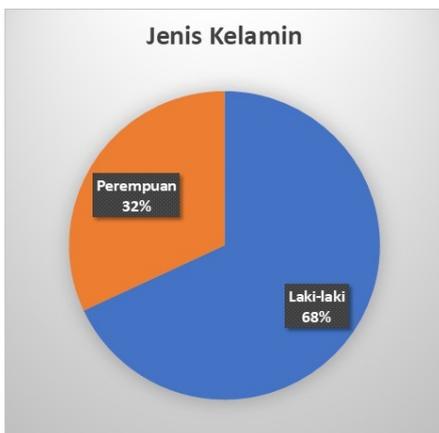
Keaktifan AP



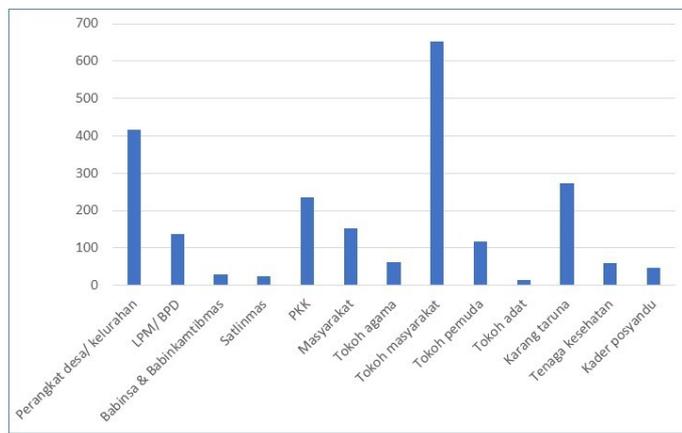
Bimtek AP



Jenis Kelamin



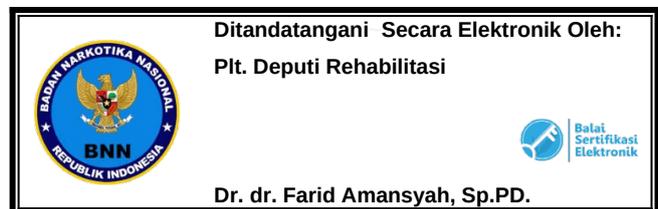
**Latar Belakang
Kemasyarakatan**



Di tahun 2024, gambaran AP sebagai berikut:

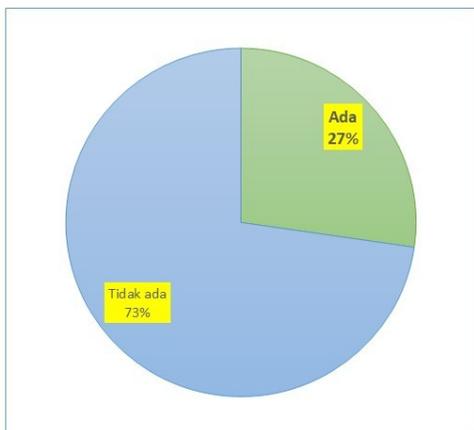
- Jumlah AP tahun 2024 adalah 2.210 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 92,94% (2.054 orang) yang aktif menjalankan kegiatan & layanan IBM
- Sebanyak 95,70% dari total AP (2.115 orang) telah dilatih oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) secara resmi, sementara sisanya memperoleh informasi dengan metode tular ilmu di antara sesama AP maupun saat asistensi oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota

- Mayoritas AP yaitu 1.504 orang (68,05%) berjenis kelamin laki-laki
- Latar belakang AP dalam masyarakat terdiri dari:
 - Sebanyak 18,82% (416 orang) merupakan perangkat desa/ kelurahan, 12 orang di antaranya adalah Kepala Desa/ Lurah
 - Sebanyak 6,15% (136 orang) merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Sebanyak 1,27% (28 orang) adalah perwakilan dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang bertugas di Desa/ Kelurahan
 - Sebanyak 1,04% (23 orang) bertugas di Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - Sebanyak 10,59% (234 orang) adalah anggota Tim Penggerak PKK
 - Sebanyak 6,88% (152 orang) adalah perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya mahasiswa, kelompok seni, pekerja sosial, penggiat/ relawan, dan organisasi kemasyarakatan
 - Sebanyak 2,81% (62 orang) adalah tokoh agama
 - Sebanyak 29,50% (652 orang) adalah tokoh masyarakat, termasuk di antaranya ketua RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan
 - Sebanyak 5,29% (117 orang) adalah tokoh pemuda
 - Sebanyak 0,59% (13 orang) adalah tokoh adat
 - Sebanyak 12,31% (272 orang) adalah ketua maupun anggota karang taruna
 - Sebanyak 2,67% (59 orang) adalah tenaga kesehatan, termasuk di antaranya adalah dokter, perawat dan petugas puskesmas, juga bidan desa
 - Sebanyak 2,08% (46 orang) adalah kader posyandu

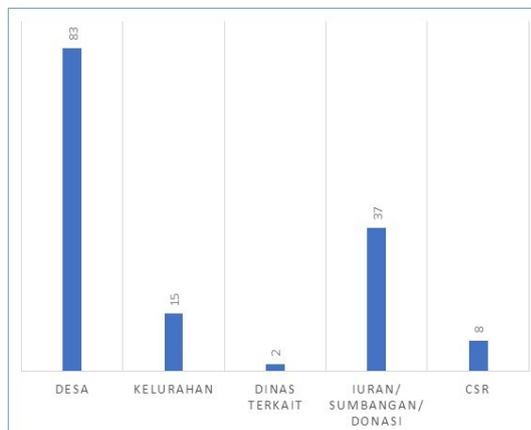


**GAMBARAN PENDANAAN MANDIRI UNTUK UNIT IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pendanaan mandiri



Sumber



Pada tahun 2024, sebanyak 115 dari 418 unit IBM (27,51%) telah memperoleh dukungan pendanaan mandiri, mayoritas berasal dari pemerintah desa. Dukungan dari pihak kelurahan relatif lebih sulit diperoleh karena diperlukan adanya aturan hukum secara resmi yang mengatur hingga ke komponen dan sub komponen kegiatan. Dukungan dana bagi unit IBM yang lokasinya di kelurahan cenderung memanfaatkan iuran/ sumbangan/ donasi dari masyarakat maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan swasta yang berdomisili di lokasi tersebut. Daftar unit IBM yang memperoleh dukungan pendanaan tahun 2024 adalah:

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	APBG	Rp4,000,000	Pembuatan papan nama IBM, struktur, alur, dan kegiatan IBM lainnya
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	APBG	Rp3,000,000	Kegiatan IBM, pembuatan papan nama IBM, struktur organisasi, alur kegiatan
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	RAB Desa	Rp7,500,000	Peningkatan kompetensi satgas narkoba
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya	RAB Desa	Rp20,000,000	ATK, konsumsi, spanduk, honor

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		we	Punteuet			dan atribut satgas
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	RAB Desa	Rp8,864,000	Operasional IBM
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	RAB Gampong	Rp9,557,000	Studi banding ke lembaga rehabilitasi, operasionalisasi IBM
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	RAB Gampong	Rp8,000,000	Kegiatan IBM, insentif AP
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	RAB Desa	Rp10,953,052	Kegiatan IBM selama 10 bulan
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	RAB Desa	Rp10,000,000	Transport AP, kegiatan & layanan IBM
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan & layanan IBM
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	RAB Desa	Rp2,750,000	Honor AP
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	RAB Desa Sumbangan warga	Rp5,400,000	Honor AP, sewa posko IBM, konsumsi kegiatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Dana desa	Rp5,400,000	Transport & insentif bulanan AP
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	RAB Nagori	Rp6,000,000	Insentif AP
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	RAB Desa	Rp7,000,000	Honor AP
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	RAB Desa	Rp5,000,000	Honor AP
21	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	RAB Desa	Rp6,590,000	Sosialisasi IBM
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	RAB Desa	Rp10,000,000	Operasional Unit IBM
23	Sumatera	BNN Kota	Desa Tanjung	Dana desa	Rp3,000,000	Honor AP

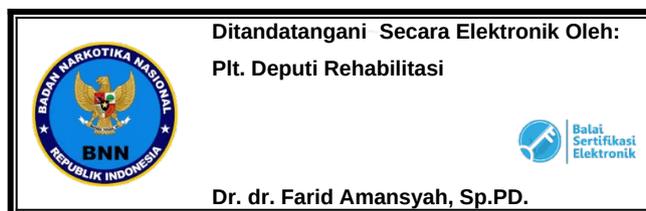
No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Selatan	Prabumulih	Telang			
24	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Dana desa	Rp25,000,000	Sosialisasi (termasuk desa bersinar)
25	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Dana desa	Rp40,000,000	Atribut AP, spanduk, kegiatan sosialisasi, ATK
26	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	RAB Desa	Rp3,000,000	
27	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	RAB Desa	Rp3,000,000	Honor AP
28	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	RAB Kampung	Rp2,594,000	Sosialisasi P4GN
29	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,550,000	Kegiatan & layanan IBM
30	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,850,000	Kegiatan & layanan IBM
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	RAB Desa	Rp3,500,000	Kegiatan IBM
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	RAB Desa	Rp41,760,000	Honor AP, kegiatan IBM
33	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Dana Kelurahan (pemberdayaan masyarakat)	Rp20,000,000	Sosialisasi P4GN
34	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp2,000,000	Kegiatan IBM, spanduk
35	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp3,450,000	Kegiatan IBM, flyer
36	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Dana kelurahan Sumbangan warga CSR	Rp6,750,000	Spanduk, Kegiatan IBM
37	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	RAB Desa	Rp15,000,000	Kegiatan IBM
38	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	RAB Desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM
39	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan P4GN
40	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp28,103,000	Operasional IBM
41	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Dana Kades	Rp7,300,000	Spanduk, transport AP, konsumsi

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
						kegiatan
42	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Dana Kades Sumbangan masyarakat	Rp3,000,000	Operasional IBM
43	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	RAB Desa	Rp8,850,000	Sosialisasi P4GN
44	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	RAB Desa	Rp9,000,000	Operasional IBM
45	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Sumbangan warga	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
46	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	RAB Desa	Rp15,000,000	Operasional IBM
47	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	RAB Desa	Rp15,005,400	Operasional IBM
48	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Sumbangan dari Kemensos	Rp5,100,000	Modal usaha klien IBM
49	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Sumbangan masyarakat CSR	Rp2,650,000	Operasional IBM
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	RAB Desa	Rp77,623,000	Desa Bersinar Kegiatan IBM (termasuk pembelian CCTV)
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	RAB Desa	Rp7,968,000	Sosialisasi/ penyuluhan
52	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Sumbangan masyarakat	Rp2,500,000	Operasional IBM
53	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Dana desa	Rp2,350,000	Atribut AP, transport klien, sosialisasi IBM
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	RAB Desa	Rp5,397,500	Penyuluhan penyalahgunaan narkotika
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Dana desa Sumbangan masyarakat	Rp8,100,000	Operasional IBM, banner
56	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	RAB Desa	Rp3,500,000	Operasional IBM
57	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp27,930,000	Sosialisasi P4GN, Rapat AP, sosialisasi
58	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	RAB Desa	Rp875,000	Transport AP
59	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	RAB Desa	Rp2,450,000	Sosialisasi IBM
60	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	APBDes	Rp8,000,000	Sosialisasi IBM
61	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	APBDes	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		A				
62	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Dana Kelurahan	Rp4,330,000	Kegiatan IBM
63	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	RAB Kelurahan LPMK	Rp6,589,800	Workshop P4GN, dukungan pendaftaran kejar paket untuk sekolah klien
64	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduharjo	RAB Kelurahan	Rp10,450,000	Layanan IBM
65	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduadi	RAB Kelurahan	Rp6,200,000	Sosialisasi IBM
66	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Potorono	Dana desa	Rp3,666,000	Sosialisasi IBM
67	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Bangunharjo	RAB Desa	Rp6,600,000	Sosialisasi IBM
68	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Dana desa luran masyarakat	Rp16,300,000	Operasional IBM
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Dana desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
70	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	RAB Desa Sumbangan kades	Rp10,442,000	Sosialisasi IBM + tambahan untuk tes urin
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	CSR luran AP	Rp3,250,000	Operasional IBM
72	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	CSR luran AP	Rp3,550,000	Operasional IBM
73	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	RAB Desa	Rp172,133,000	Operasional IBM dalam mendukung P4GN
74	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	RAB Desa	Rp20,000,000	Operasional IBM
75	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	RAB Kelurahan	Rp1,225,000	Sosialisasi bahaya napza
76	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	RAB Desa	Rp21,175,000	Sosialisasi IBM
77	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Dana pemberdayaan kelurahan Sumbangan lurah	Rp3,000,000	Sosialisasi IBM, transport klien
78	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	RAB Desa	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
79	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	luran warga	Rp2,500,000	operasional IBM
80	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Dana desa	Rp15,000,000	Atribut AP, sosialisasi IBM
81	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	RAB Desa	Rp10,000,000	Honor AP, transport klien
82	Jawa Timur	BNN Kab.	Desa	RAB Desa	Rp9,545,000	Honor AP,

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		Nganjuk	Kwagean			transport klien
83	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	RAB Kelurahan	Rp1,150,000	Kegiatan IBM, atribut AP
84	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	RAB Kelurahan	Rp10,000,000	Operasional IBM
85	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	RAB Kelurahan	Rp3,150,000	Operasional IBM
86	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	RAB Kelurahan	Rp8,052,000	Operasional IBM
87	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	APBDes	Rp2,500,000	Operasional IBM
88	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	APBDes	Rp17,365,000	Konsumsi & transport kegiatan IBM
89	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Iuran masyarakat	Rp2,500,000	Kegiatan IBM
90	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Dana Lurah CSR	Rp6,200,000	Atribut AP, stiker, banner
91	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Iuran masyarakat	Rp2,800,000	Operasional IBM
92	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	APBDes	Rp7,430,000	Operasional IBM
93	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	RAB Desa	Rp12,000,000	Kegiatan IBM, media sosialisasi
94	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	APBDes	Rp6,000,000	Kegiatan & layanan IBM
95	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Dana Kelurahan CSR	Rp50,500,000	Study Banding ke Babes Lido, atribut AP, operasional IBM
96	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Dinkes Bidang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Dana kelurahan	Rp. 3.625.000	Sosialisasi IBM
97	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
98	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
99	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	RAB Kampung	Rp4,075,000	Kegiatan IBM
100	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dana desa	Rp8,950,000	Atribut AP, kegiatan IBM
101	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan IBM, sarana prasarana, transport klien
102	Sulawesi	BNN Kota	Kelurahan	Iuran Pengusaha	Rp2,500,000	Operasional

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Palu	Mamboro Barat			IBM
103	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM, transport AP untuk penjangkauan
104	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp16,639,000	transport AP, konsumsi kegiatan & layanan, honor AP
105	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Sumbangan masyarakat	Rp3,500,000	Kegiatan & layanan IBM
106	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	RAB Desa Donatur	Rp43,550,000	Kegiatan IBM
107	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	RAB Desa Donatur	Rp30,700,000	Kegiatan IBM
108	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Sumbangan	Rp4,076,000	Operasional IBM
109	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Sumbangan	Rp2,850,000	Operasional IBM, atribut AP
110	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
111	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
112	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	RAB Desa	Rp4,800,000	Sosialisasi, tes urin
113	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Anggaran desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
114	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	RAB Desa	Rp2,000,000	Operasional IBM
115	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	APBDes	Rp10,500,000	Kegiatan IBM



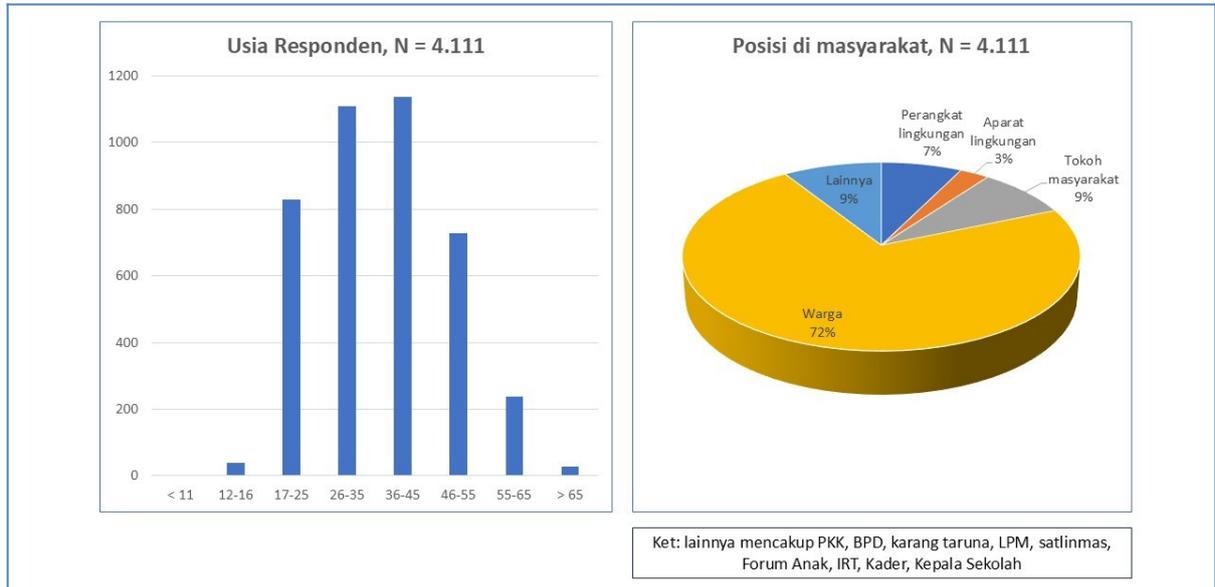
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 30 Desember 2024

HASIL SURVEY KEBERMANFAATAN PROGRAM IBM

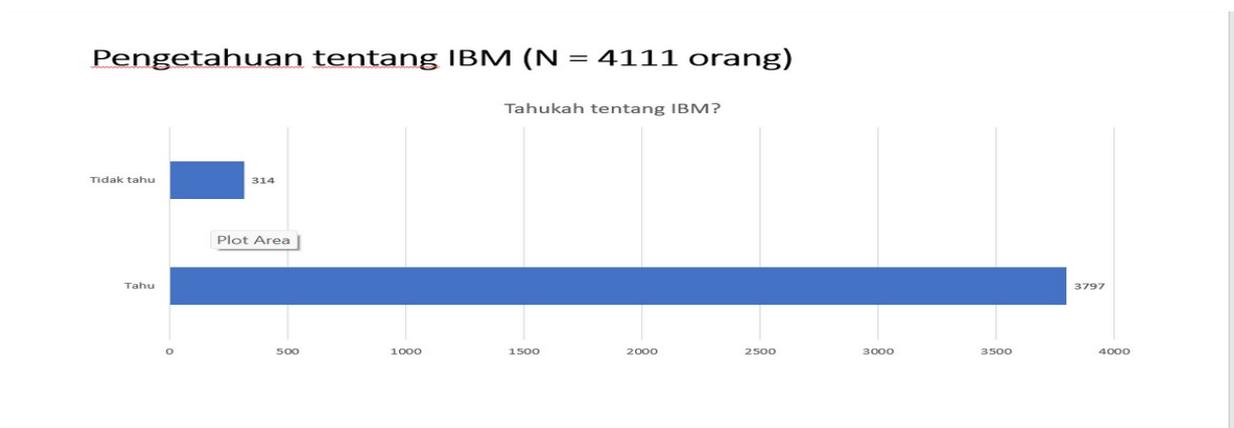
TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

A. Data demografi responden



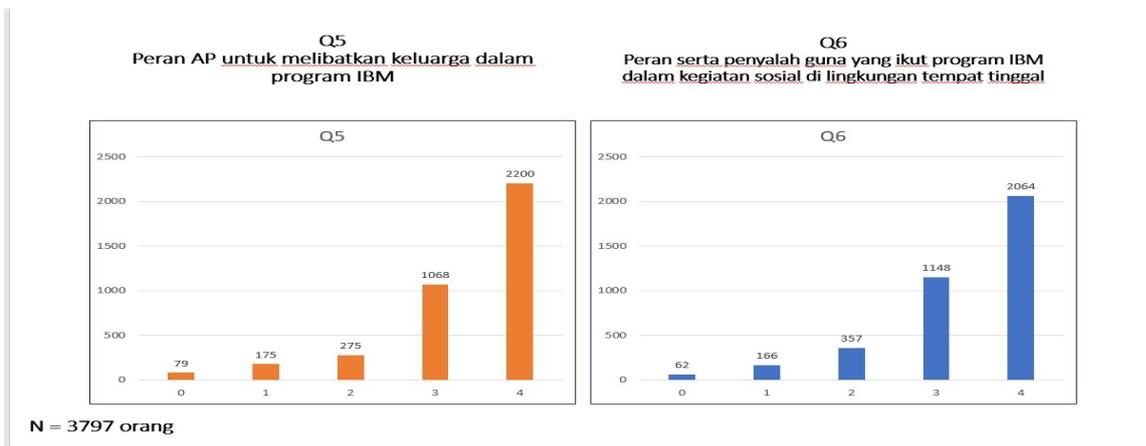
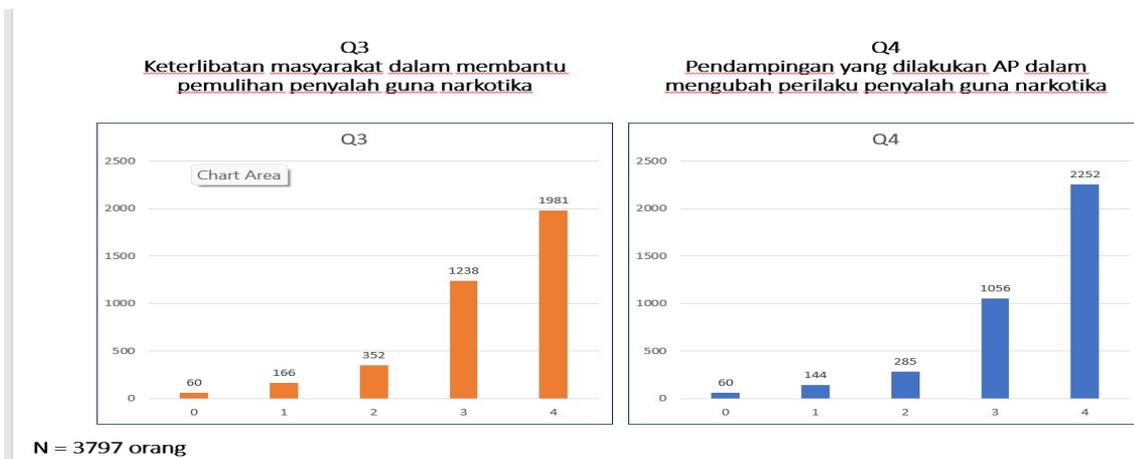
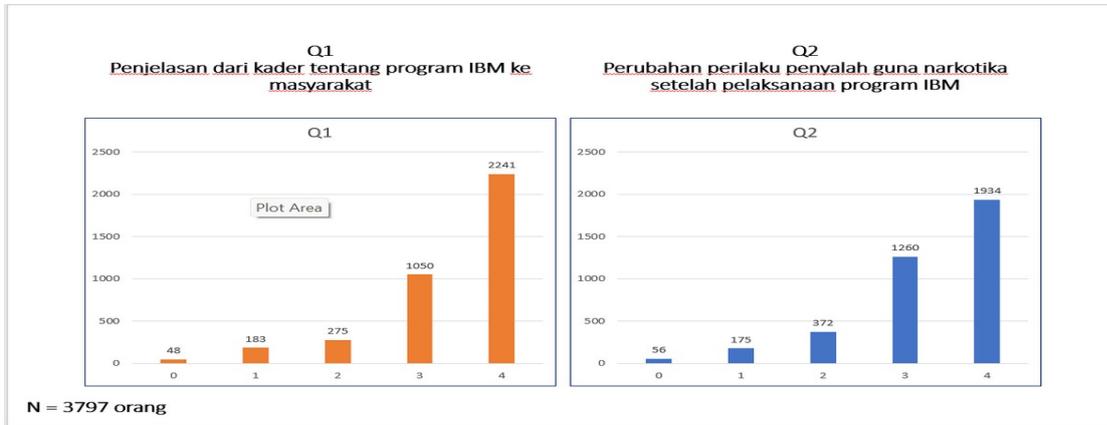
Mayoritas responden berada pada kelompok usia 36-45 tahun, dilanjutkan dengan selisih yang kurang signifikan dengan kelompok usia 26-35 tahun. Sebanyak 72% dari total responden merupakan warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan Lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden (92,36%) mengetahui keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili

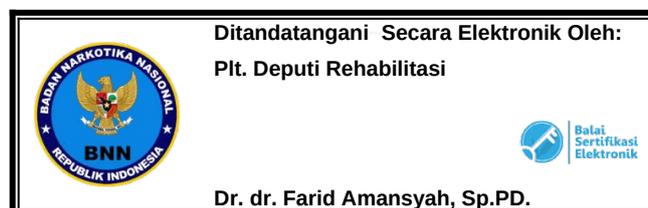
C. Hasil Pelaksanaan survey



Penjelasan hasil survey:

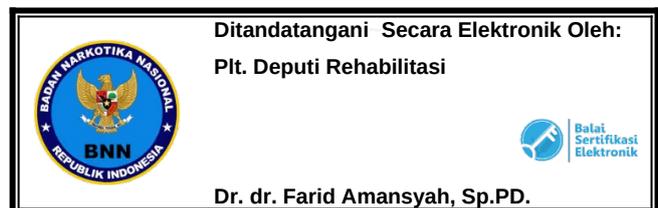
No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
1	Penjelasan dari Agen Pemulihan tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi

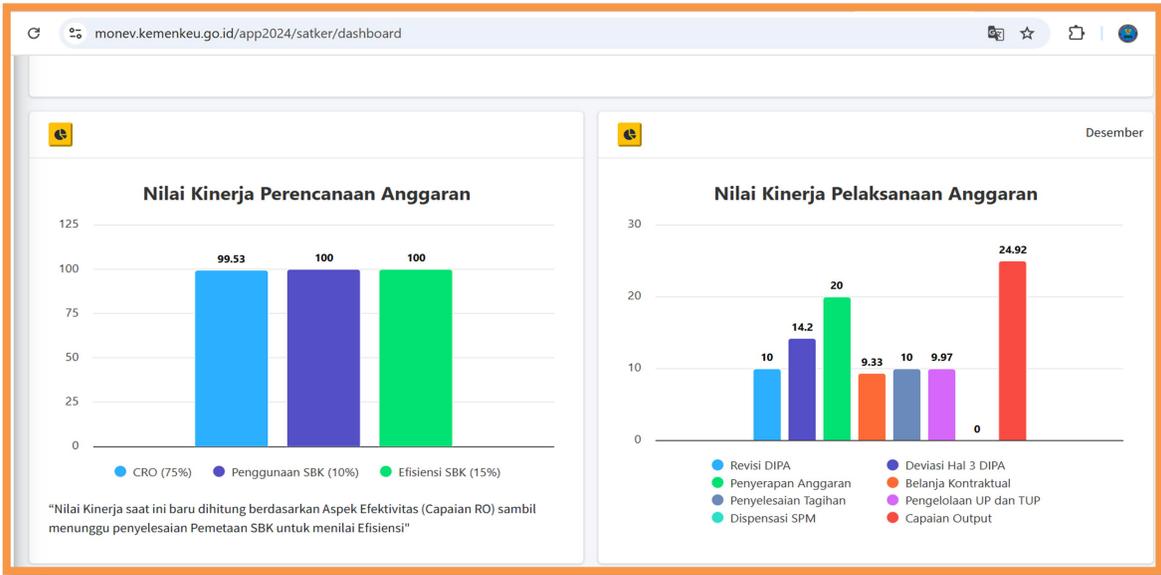
No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkotika setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Lebih menilai peran IBM terhadap dampak kepada lingkungan menurut pengamatan masyarakat	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkotika dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkotika di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna	Agen Pemulihan melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkotika
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkotika. Dengan melibatkan keluarga, keluarga dapat paham bahwa masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkotika dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkotika yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalahguna narkotika mulai peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat (pengajian, 17 Agustusan, dsb).	Sangat berperan dalam kegiatan



**FAKTOR PENDUKUNG & PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	3
1. Petugas Pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota	
Pemahaman yang komprehensif akan program IBM, termasuk alur kegiatan & layanan serta alokasi anggaran yang tersedia	Pendampingan unit IBM tidak menjadi prioritas karena banyaknya program bidang/ seksi Rehabilitasi yang harus dilakukan, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki
Terjalannya hubungan baik dengan AP dan kepala desa/ lurah di lokasi IBM sebagai hasil dari tingginya intensitas koordinasi dan advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media bukan hanya tatap muka	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.
2. Agen Pemulihan (AP)	
Kepedulian serta kesadaran diri dari AP di dukung oleh peran serta aktif dari lingkungan masyarakat sekitar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba	Pemahaman yang kurang optimal serta ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan program IBM
Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai AP	Pelaksanaan program IBM tidak menjadi prioritas karena AP disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya
3. Kepala Desa/ Lurah	
Komitmen, minat dan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan dalam bidang rehabilitasi penyalah guna narkoba	Program IBM tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan
Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya yang memerlukan penanganan segera	Penolakan data & informasi adanya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayahnya





MONEV - BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI (BNN) - Role: Pilih TA (2024) - Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Tampilkan 25 entri | Cari:

[Download Excel](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	99,65	98,42	99,04

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU REALISASI	0 0.00%	53,672,000 47,889,600 (89.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	53,672,000 47,889,600 (89.23%)
		SISA	0	5,782,400	0	0	0	0	0	0	0	5,782,400
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU REALISASI	0 0.00%	5,440,000 5,439,000 (99.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,440,000 5,439,000 (99.98%)
		SISA	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	PAGU REALISASI	0 0.00%	6,356,000 5,690,000 (89.52%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,356,000 5,690,000 (89.52%)
		SISA	0	666,000	0	0	0	0	0	0	0	666,000
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU REALISASI	0 0.00%	975,893,000 975,032,659 (99.91%)	123,955,000 123,339,850 (99.50%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,099,848,000 1,098,372,509 (99.87%)
		SISA	0	860,341	615,150	0	0	0	0	0	0	1,475,491
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	106,000,000 104,500,000 (98.58%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	106,000,000 104,500,000 (98.58%)
		SISA	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,550,000 6,500,000 (86.09%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,550,000 6,500,000 (86.09%)
		SISA	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
7	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	162,550,000 162,550,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	162,550,000 162,550,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI

8	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	PAGU REALISASI	0 0.00%	22,275,000 22,275,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	22,275,000 22,275,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0 0.00%	14,800,000 14,800,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,800,000 14,800,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	310,375,000 294,673,333 (94.94%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	310,375,000 294,673,333 (94.94%)
		SISA	0	15,701,667	0	0	0	0	0	0	0	15,701,667
11	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,000,000 8,540,000 (85.40%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,000,000 8,540,000 (85.40%)
		SISA	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
12	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	70,000,000 68,300,000 (97.57%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	70,000,000 68,300,000 (97.57%)
		SISA	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	1,744,911,000 1,716,189,592 (98.35%)	123,955,000 123,339,850 (99.50%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,868,866,000 1,839,529,442 (98.43%)
		SISA	0	28,721,408	615,150	0	0	0	0	0	0	29,336,558



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	066	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	Nilai	100.00	94.67	100.00	93.33	100.00	99.73	99.67	98.42	100%	0.00	98.42
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	14.20	20.00	9.33	10.00	9.97	24.92				
					Nilai Aspek	97.34		98.27				99.67				